

**ANALISIS PERAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN DI SEKTOR USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH (UMKM) GARAM
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN
DAERAH**

**(STUDI PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

MUHAMMAD FIRDAUS
135030407111051



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG

2018

HIDUP SEKALI BUAT BERARTI SUDAH ITU BARU MATI



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
di Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Garam Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah
(Studi Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Probolinggo)

Disusunoleh : Muhammad Firdaus

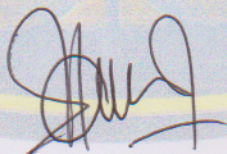
NIM : 135030407111051

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Administrasi Perpajakan

Malang, 16 Mei 2018

Komisi Pembimbing
Ketua



Latifah Hanum, SE, MSA, Ak
NIP. 2014058406172001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 04 Juli 2018

Jam : 11.00

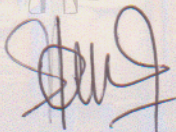
Skripsi atas nama : Muhammad Firdaus

Judul : Analisis Peran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
di Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Garam Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah
(Studi Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo)

LULUS

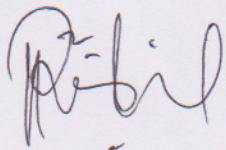
MAJELIS PENGUJI

Ketua,



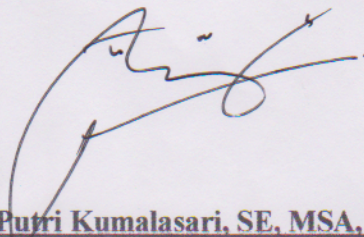
Latifah Hanum, SE, MSA, AK
NIP. 20140584 0617 2 001

Anggota,



Rosalita Rachma Agusti, SE, MSA, AK
NIP. 19870831 201404 2 001

Anggota,



Kartika Putri Kumalasari, SE, MSA, AK, CA
NIP. 1987112320 1504 2 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 16 Mei 2018

Mahasiswa



Monammad Firdaus
NIM. 135030407111051

RINGKASAN

Muhammad Firdaus, 2018. **Analisis Peran pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Garam sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah** (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Probolinggo). Latifah Hanum., SE., MSA., Ak. 109 halaman + xvi.

Penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah”. Penelitian ini berfokus pada penerapan pajak mineral bukan logam dan batuan bagi UMKM garam dalam upaya meningkatkan PAD Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Probolinggo dan kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo. Hasil dari penelitian ini adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari sektor pajak kurang berjalan dengan lancar dari target pajak daerah sebesar Rp 40.38 milyar masih terealisasi sebesar Rp 11,88 milyar di tahun 2017. Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam upaya mengembangkan potensi pajak yang ada di Kabupaten Probolinggo. Melihat adanya ketimpangan desentralisasi fiskal yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah dinilai kurang mampu dalam mengelola potensi pajak daerah yang ada, khususnya pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, namun tidak dapat dipungkiri kinerja pemerintah dalam mengelola penerimaan daerah yang lain cukup dinilai baik dalam pencapaiannya.

Berdasarkan hasil penelitian, BPPKAD Kabupaten Probolinggo diharapkan melakukan pengawasan terhadap UMKM yang ada di Kabupaten Probolinggo, Melakukan usaha atau membuat inovasi baru agar dapat menarik Usaha Kecil Menengah (UKM) atau Usaha Besar (UB) serta investor dan perusahaan untuk masuk dan mengeksplorasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ada di Kabupaten Probolinggo, dan terus mendampingi UMKM dalam menjalankan usahanya. Bagi UMKM yang belum melegalkan usahanya diharapkan segera melakukan legalitas bagi usahanya dan mendaftarkan izin usahanya.

Kata Kunci: Desentralisasi, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, UMKM Garam, dan Pendapatan Daerah.

SUMMARY

Muhammad Firdaus, 2018. **Analysis of Mineral Role of Non Metal and Rock In Small and Medium Micro Enterprise (MSME) Salt as Effort of Increasing Local Revenue** (Study at Probolinggo Regional Revenue). Latifah Hanum., SE., MSA., Ak. 109 pages + xvi.

Research on Law Number 33 Year 2004 regarding "Financial Balance between Government and Local Government indicating in the framework of regional autonomy and tax decentralization, local government is given freedom to manage and use the resources in accordance with the aspirations of the local community." This research was conducted in mineral minerals and metals for SMEs salt in an effort to increase PAD Probolinggo regency. This research uses qualitative research method with descriptive approach to explain the problems that occurred. This research was conducted in Probolinggo and the Regional Asset Control Agency (BPPKAD) Probolinggo Regency. of this research is income derived from the bad tax sector with the result of the local tax target of Rp 40.38 billion is still realized for Rp 11.88 billion in 2017. Things that are very big for the local government in an effort to develop tax potential in Probolinggo District. There is no discrepancy between taxation decentralization between central and local governments that want greater accessibility to taxes, which at the same time is not possible, but there is no denying government work in managing. both in achievement.

Based on the results of the research, BPPKAD Probolinggo District is expected to conduct supervision on MSMEs in Probolinggo District, making new innovation efforts to help Small and Medium Enterprises (SMEs) or Big Enterprises (UB) and investors and companies to enter and exploit. Metals and Rocks in Probolinggo District, and continue to assist MSMEs in running their business. For MSME that has not legalized its business is expected to immediately do legality for business and business license business.

Keywords: Decentralization, Non-Metallic Mineral and Stone Taxes, MSME Salt, and Local Revenue.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karyaku Kepada:

Ayahanda dan Ibunda Tercinta

SAUDARA-SAUDARAKU

Serta semua sahabat-sahabatku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Peran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Garam Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah”**. Skripsi ini merupakan tugas semester akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan (S.Pn.) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
2. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg, MBA. selaku Ketua Jurusan administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
3. Ibu Dra., Saparilla Worokinasih, M.Si. selaku Ketua Program studi administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
4. Ibu Latifah Hanum, SE, MSA, Ak. selaku komisi pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi;
5. Seluruh jajaran dosen, karyawan, dan tenaga kependidikan yang tergabung dalam civitas akademika Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
6. Bapak Moch. Hasyim dan Ibu Siti Rukiah, yaitu orangtua penulis yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun materil dan selalu memberikan doa-doa tulus bagi anaknya selama proses penyusunan skripsi hingga selesai;

7. Bapak Susilo selaku kepala bidang pendapatan di BPPKAD Kabupaten Probolinggo serta Bapak Arif selaku sub bidang penagiha di BPPKAD Kabupaten Probolinggo dan Bapak Bambang selaku perwakilan petani garam yang telah menyempatkan waktu untuk memberikan informasi dan data terkait penelitian ;
8. Teman seperjuangan di Malang Theo, Iqbal, Rossi, Edo, Bono, Ria, Ambon, Laily, dan Tewe. Terima kasih telah memberikan dorongan serta motivasi disaat penulis menyusun skripsi ;
9. Teman diskusi, Randy Prasetyo, Ustad Rusli dan Ulfa Riska Megawati, yang telah mau bersedia meluangkan waktunya memeriksa konten skripsi ini dan memberikan masukan-masukan yang sangat positif ;
10. Teman-teman pajak kelas F serta khususnya kawan-kawan Perpajakan angkatan 2013 khususnya yang memberikan dukungan serta semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu peneliti baik dalam proses perkuliahan, organisasi, hingga penelitian dan penyelesaian skripsi.

Selayaknya manusia dapat melakukan kesalahan dalam kesempatan ini peneliti juga memohon maaf jika ada kesalahan, kekhilafan, dan kekeliruan baik tutur kata dan penulisan yang tidak disengaja maupun disengaja. Saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
 BAB 1 PENDAHULUAN.....	 01
A. Latar Belakang	01
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penulisan	11
D. Kontribusi Penelitian	12
E. Sistematika Pembahasan.....	13
 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	 15
A. Tinjauan Empiris	15
B. Tinjauan Teoritis	21
1. Otonomi Daerah	21
2. Desentralisasi	24
a. Definisi Desentralisasi Fiskal.....	24
b. Konsep Desentralisasi Fiskal.....	25
c. Aspek Desentralisasi.....	26
d. Prasyarat Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal.....	27
3. Pajak Daerah	27
a. Pengertian Pajak Daerah	27
b. Jenis Jenis Pajak Daerah	28
c. Dasar Hukum.....	29
4. Pendapatan Asli Daerah.....	33
a. Definisi Pendapatan Asli Daerah.....	33
b. Konsep dan Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.....	33
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	37
6. Peran.....	39
7. Garam.....	43
a. Pengertian Garam.....	43
b. Sumber Garam.....	44
c. Teknologi Pembuatan Garam.....	44
d. Jenis Garam.....	46
8. Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	47
a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	47
b. Tujuan dan Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	49
c. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	50
d. Tantangan dan Permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah..	51
C. Kerangka Pemikiran	58

BAB 3 METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Fokus Penelitian.....	56
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	57
D. Sumber dan Jenis Data	58
E. Teknik Pengumpulan Data	60
F. Instrument Penelitian.....	61
G. Keabsahan Data.....	62
H. Teknik Analisis Data.....	64
 BAB 4 HASIL dan PEMBAHASAN	 66
A. Penyajian Data Umum.....	66
1. Gambaran Umum BPPKAD.....	66
2. Lokasi Penelitian.....	67
3. Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi.....	67
B. Gambaran Umum BPPKAD	74
C. Penyajian Data	75
1. Peran UMKM	75
a. Penerapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	75
b. Peningkatan pendapatan daerah	80
2. Pengembangan UMKM di sektor garam.....	83
3. Upaya BPPKAD dalam meningkatkan pendapatan daerah	90
D. Analisis Data dan Pembahasan	95
1. Peran UMKM	95
a. Penerapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	95
b. Peningkatan pendapatan daerah.....	97
2. Pengembangan UMKM di sektor garam.....	99
3. Upaya BPPKAD dalam meningkatkan pendapatan daerah	102
 BAB 5 KESIMPULAN	 106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah UMKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2016	08
Tabel 2.1 Tinjauan Empiris Penelitian Terdahulu	19



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pendapatan dan Belanja Negara APBN Tahun 2016	02
Gambar 1.2 Belanja Negara APBN Tahun 2016	02
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	54
Gambar 3.1 Analisis Data Kualitatif	63



BAB I

PENDAHULUAN

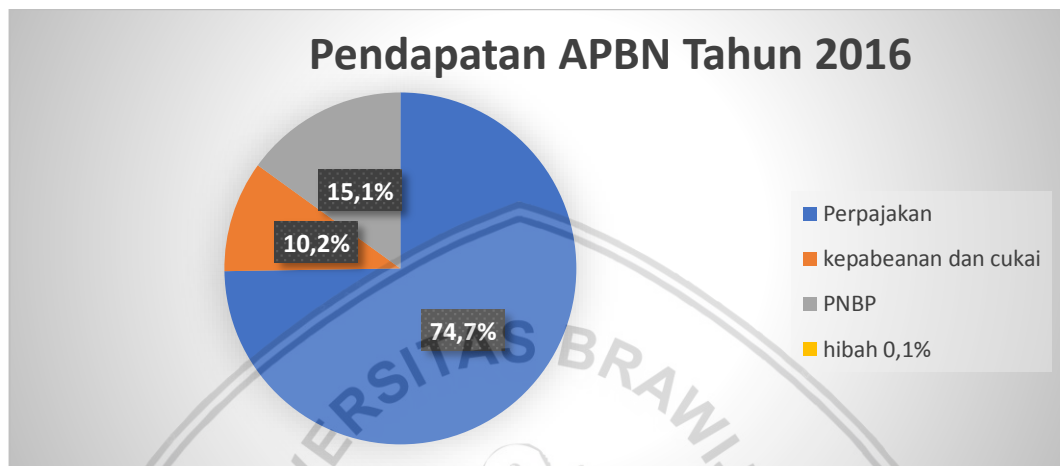
A. Latar Belakang

Pembangunan nasional meliputi segala bidang dan tentunya perlu mendapatkan perhatian serius baik dari pihak pemerintah pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Pembangunan itu sendiri hanya dapat dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam maupun luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah. Salah satu sumber penerimaan dari dalam negeri adalah dari sektor pajak yang merupakan bentuk pengabdian dan peran serta langsung masyarakat dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional, juga merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumber pendapatan dan asal muasal anggaran yang di dapat oleh Negara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 2016 pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan tentang pendapatan Negara merupakan hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Hibah. Sedangkan ayat (3) menjelaskan tentang penerimaan Pajak adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan

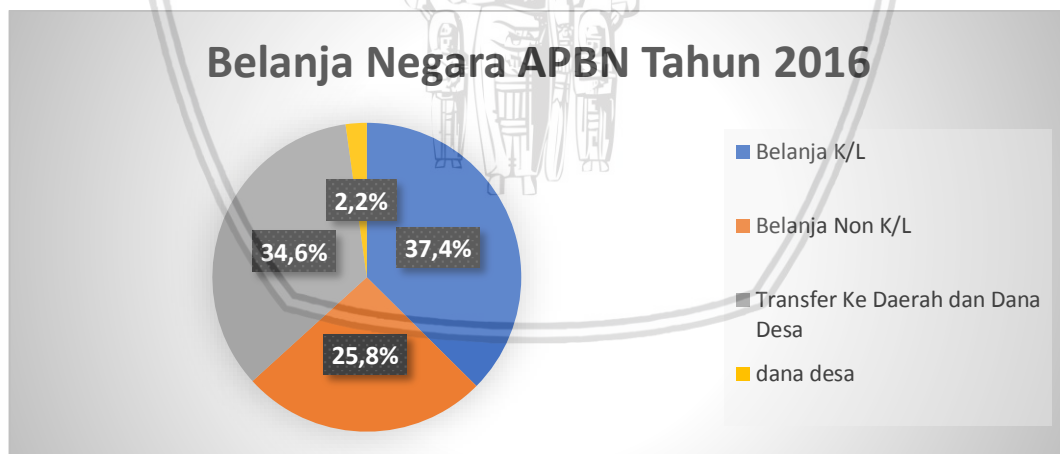
Internasional. Berikut data APBN yang bersumber dari pajak tahun 2017 yang dapat dilihat dalam gambar 1.1 dan gambar 1.2

Gambar 1.1 Pendapatan APBN Tahun 2016



Sumber : www.kemenkeu.go.id, Olahan Penulis, 2017

Gambar 1.2 Belanja Negara APBN Tahun 2016



Sumber : www.kemenkeu.go.id, Olahan Penulis, 2017

Berdasarkan gambar 1.1 dan gambar 1.2 bahwa sumber pendapatan negara tahun 2016 bersumber dari pajak dengan nilai prosentase angka 74.7% dan kepabeanan dan cukai 10,2%. Sedangkan 15,1% bersumber dari PNPB dan 0,1% bersumber dari Hibah. Pada Segi APBN Belanja Negara, pengeluaran

paling tinggi terfokus pada transfer ke daerah dan dana desa dengan nilai prosentase angka 34.6% dari belanja Kementrian/Lembaga dengan nilai 37.4% dan belanja non Kementerian/Lembaga sebesar 25.8%. Gambar di atas membuktikan bahwa pajak menjadi faktor utama dalam meningkatkan pembangunan daerah.

APBN yang bersumber dari dana pajak nantinya diperuntukan dalam kegiatan keuangan negara selama satu tahun sebagai upaya pemenuhan hak dan kewajiban negara untuk masyarakat. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Untuk melaksanakan dan menyelenggarakan Otonomi Daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, Pemerintah Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik. Sistem penyelenggaraan pemerintahan sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan pembangunan daerah di Indonesia lebih didominasi oleh pusat sehingga terjadilah ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah di Indonesia.

Oleh sebab itu daerah-daerah di Indonesia menuntut diberlakukannya Otonomi Daerah. Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak, dan wewenang daerah otonom ini menjadi kewajiban daerah untuk terus mengupayakan kepentingan masyarakatnya, terutama dari segi pembangunan ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Untuk melaksanakan dan menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien, yakni dalam bidang pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam rangka menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, pemerintah daerah memerlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu,

pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, penerimaan hasil pajak sangat di andalkan oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat di katakakan bahwa pajak pada dasarnya ialah iuran yang di bayarkan oleh wajib pajak yang digunakan untuk membiayai kepentingan negara serta mensejahterahkan rakyat. Sifatnya yang memaksa ini menegaskan bahwa sektor perpajakan dapat di pastikan memberikan kontribusi terbesar di bandingkan dengan penerimaan dari sektor lainnya.

Pemungutan pajak dalam pembangunan di Indonesia menjadi anggaran yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Hal itu menjadi kepastian dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 sebagai sumber anggaran pembangunan nasional. Selain itu target pajak dalam pemenuhan APBN memiliki fungsi penunjang dan fasilitas untuk masyarakat agar menjadi fasilitator dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Menurut Kaho,

(1995) dalam Mukhlis (2010 : 2-3) ; Pajak Daerah berasal dari Pajak Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai Pajak Daerah, penyerahan dilakukan berdasarkan Undang Undang. Pajak Daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang Undang dan atau peraturan hukum lainnya, hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik. Dalam hal ini terdapat tolak ukur untuk menilai pajak daerah. Menurut Davey (1988) dalam Mukhlis (2010 : 2-3) tolak ukur untuk menilai Pajak Daerah meliputi hasil, keadilan, daya guna ekonomi, dan kemampuan melaksanakan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah.

Salah satu Pendapatan yang diterima oleh Daerah sebagai bentuk Pembangunan Daerah di sektor Perpajakan salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan jenis usaha yang lebih dominan di Indonesia dibandingkan dengan jenis Usaha Besar (UB). Dimana UMKM dianggap sebagai sektor yang memiliki peranan penting. Dilain hal itu, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dalam segi hal pekerjaan maupun pendapatan sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Seperti yang tercantum dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 yang menjelaskan bahwa sistem ekonomi di Indonesia adalah ekonomi kerakyatan.

Dengan semakin meningkatnya jumlah dan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maka dapat di harapkan memberikan kontribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pajak yang di kenakan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu sebesar 1% sesuai yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Pada bulan juli 2013 di tetapkan wajib pajak badan atau orang pribadi dengan predaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dikenakan pajak final 1%. Tetapi masih ada anggapan bahwa kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tidak sesuai dengan prinsip perpajakan. Faisal Basri mengatakan kebijakan PP No. 46 Tahun 2013 berbeda dengan kebijakan pajak yang diterapkan untuk korporasi yang dasar pengenaannya pajak di hitung dari laba usaha, seharusnya pemerintah terlebih dahulu memaksimalkan penerimaan pajak dari korporasi dan orang-orang berada.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diharuskan membayar pajak 1% dari omzetnya akan tetapi omzet tersebut belum tentu laba , jadi laba atau rugi Usaha Kecil dan Menengah harus membayar satu persen, seharusnya pajak yang di kenakan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) menggunakan patokan laba usaha karna Faisal meyakini bahwa Usaha Kecil dan Menengah pasti sudah memiliki pembukuan sederhana (www.beritasatu.com, diakses tahun 2017).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah bagian dari roda kegiatan ekonomi kerakyatan yang pada awalnya sudah berkembang dan besar. Diliat dari aspek seperti peningkatan kesempatan kerja, sumber pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan menjadi langkah awal dari berkembangnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satunya adalah Kabupaten Probolinggo yang merupakan daerah yang memiliki potensi Usah Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang cukup tinggi. Berikut urutan tingkat jumlah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan tenaga kerja di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1.1 Jumlah UMKM di Provinsi Jawa Timur

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	
		UMKM	Tenaga Kerja
1	Jember	424.151	729.962
2	Malang	414.516	862.375
3	Banyuwangi	296.706	501.379
4	Bojonegoro	281.967	471.481
5	Sumenep	269.005	486.196
6	Kota Surabaya	260.762	466.779
7	Blitar	255.622	406.719
8	Lamongan	252.734	421.825
9	Kediri	251.493	395.355
10	Pasuruan	248.802	403.965
11	Probolinggo	235.286	397.327
12	Tuban	223.998	370.537
13	Ponorogo	207.561	306.487
14	Nganjuk	201.463	322.229
15	Lumajang	196.446	287.251

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur tahun 2016
(<http://diskopumkm.jatimprov.go.id>)

Tabel 1.1 menjelaskan terkait jumlah UMKM dan tenaga kerja di wilayah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo sebagai Kabupaten dengan urutan ke 11 dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Jumlah UMKM di Kabupaten Probolinggo mencapai 235.286 dengan tenaga kerja sebanyak 397.327. Jumlah UMKM tertinggi di Provinsi Jawa Timur dimiliki oleh Kabupaten Jember dengan jumlah 424.151 UMKM. Hal tersebut harusnya menjadi tolak ukur bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan UMKM melalui Pajak Daerah.

Kabupaten Probolinggo merupakan Kabupaten yang memiliki transfusi dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 257.793.978.644,00 (<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>). Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dicapai pemerintah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016 mencapai Rp 207.000.000.000. Pencapaian tersebut dicapai melalui Pajak Daerah sebesar Rp 40.127.956.899. Berdasarkan jumlah PAD yang diperoleh Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016 pencapaian pajak daerah merupakan perolehan pendapatan tertinggi dari sekian perolehan PAD yang ada (<http://www.probolinggokab.go.id>). Perolehan PAD ini merupakan salah satu komponen dalam APBD Kabupaten Probolinggo yang digunakan untuk dana pembangunan khususnya dalam segi hal pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) guna mensejahterakan kalangan pengusaha dan pedagang kecil khususnya di sektor industri garam.

Meningkatnya jumlah dan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor garam maka dapat di harapkan memberikan kontribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun selama ini pajak untuk petani garam di Kabupaten Probolinggo masih belum diterapkan serta dikenakan tarif pajak. Melihat kondisi dan potensi di Kabupaten Probolinggo rata-rata masyarakatnya banyak yang hidup di wilayah pesisir seperti di Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan. Garam merupakan sumber daya alam mineral yang wajib menjadi salah satu asupan kebutuhan setiap rumah tangga. Pemerintah Kabupaten Probolinggo sendiri masih belum mengenakan tarif pajak terkait Sumber daya alam ini. Fenomena yang terjadi terhadap peran

langsung pemerintah terhadap perkembangan pajak untuk garam menjadi perbincangan hangat, terutama dalam segi pemanfaatan fasilitas, pemberian bantuan dana, dan termasuk legalitas lahan agar menjadi berkembang. Garam yang tergolong pada Pajak Daerah dalam jenis Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan. Kegiatan usaha mineral garam di Desa Kalibuntu dalam segi penjualan sudah sampai dalam cakupan daerah Jember, Bondowoso, dan Lumajang. Hal tersebut bisa dikatakan berhasil dalam upaya petani garam untuk mengembangkan usahanya secara mandiri.

Perlunya pengawasan terhadap pemungutan pajak yang belum ditetapkan Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terkait Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menjadi suatu aset yang harus diterapkan. Selain itu potensi Sumber Daya Manusia dalam membangun usaha di Desa Kalibuntu sangat tinggi, mengingat masyarakat desa sangat memahami teknik dalam pembuatan garam yang baik dan bagus. Perlunya penyediaan fasilitas dan sosialisasi jaringan untuk mengembangkan UMKM garam harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan kalau produksi garam masih belum bisa mencakupi kebutuhan dalam negeri, hal ini disebabkan dari jumlah tambak garam total 34 ribu ha, hanya separuh yang memproduksi. Padahal untuk mencakupi kebutuhan dalam negeri dibutuhkan lahan tambak seluas 50 ribu ha. Pemerintah Daerah diminta memulai program revitalisasi tambak gara,. Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta pemda (bupati sampai camat) memberikan rekomendasi revitalisasi tambak.

Mempersiapkan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sebagian dari APBN sebesar 10 miliar rupiah bagi daerah yang ingin mengembangkan tambaknya. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (Jakarta 2015)

Penjelasan di atas mengenai permasalahan Penerapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai upaya pengembangan UMKM untuk mensejahterakan petani garam di Kabupaten Probolinggo masih menimbulkan permasalahan dalam pengembangannya. Permasalahan tersebut adalah bagaimana pemerintah Kabupaten Probolinggo memanfaatkan Pajak Daerah di bidang Mineral Bukan Logam dan Batuan. Selain itu upaya pemerintah dalam pengembangan UMKM untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian UMKM sebagai penyedia fasilitas dari pembangunan. Hal ini menimbulkan gagasan peneliti untuk mengkaji lebih dalam terkait **“Analisis Peran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Garam Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai upaya pengembangan UMKM sektor garam di Kabupaten Probolinggo ?
2. Bagaimana pengembangan UMKM di Sektor Garam dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Probolinggo ?

3. Bagaimana upaya Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) dalam menggali potensi Pajak Daerah sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Probolinggo ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan mendeskripsikan peran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sektor garam di Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk mengetahui, menjelaskan dan mendeskripsikan pengembangan UMKM sektor garam dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Probolinggo.
3. Untuk mengetahui, menjelaskan dan mendeskripsikan upaya Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) dalam menggali potensi Pajak Daerah sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Probolinggo.\

D. Kontribusi Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian judul Analisis Peran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) studi pada UMKM sektor garam di Desa Kalibuntu dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Probolinggo memberikan kontribusi, baik itu teoritis maupun praktis.

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam bidang perpajakan dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Khususnya mengenai Analisis Peran Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor garam di Kabupaten Probolinggo

2. Aspek Praktis

a. Bagi peneliti

Dapat menambah pengetahuan peneliti tentang Analisis Peran Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor garam di Kabupaten Probolinggo.

b. Bagi instansi terkait

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi instansi terkait dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan selanjutnya. Bagi Wajib Pajak UMKM, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan Proposal Skripsi ini terdiri dari 3

Bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah tujuan penelitian, Kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang mendasari penelitian, penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian, kerangka pemikiran dan model hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas dan menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, variable dan pengukuran, populasi dan sampel, pengumpulan data dan teknis analisis data. Peneliti menggunakan metode penelitian penjelasan.

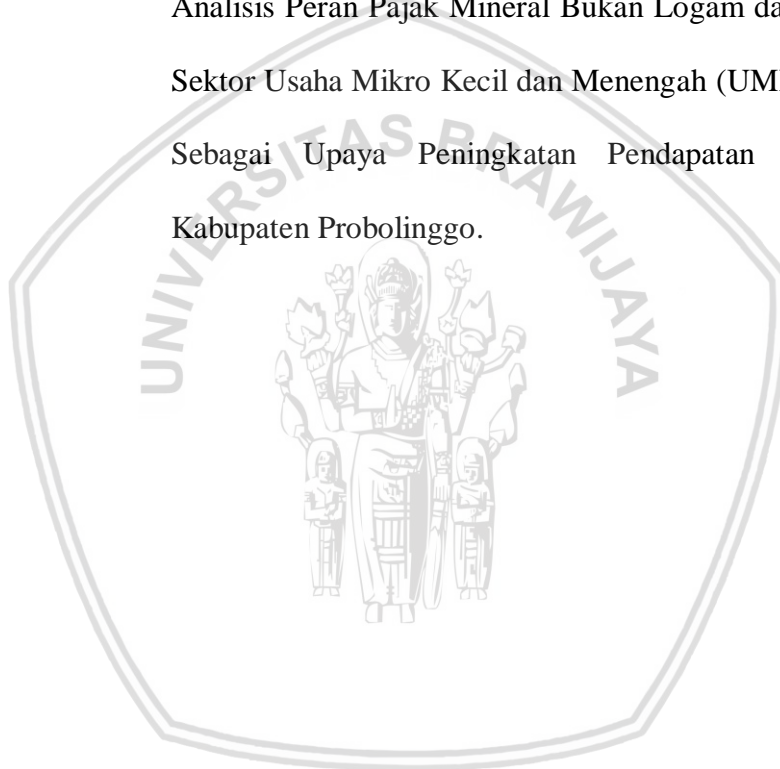
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai profil lokasi penelitian yaitu Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo dan tambak garam di desa Sidopekso Kecamatan Kraksaan, serta menjelaskan hasil penelitian berupa penyajian data

yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian dan pembahasan berupa analisis dan interpretasi data.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan secara ringkas mengenai kesimpulan dan saran yang berhasil dianalisa oleh peneliti mengenai Analisis Peran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Garam Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Probolinggo.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris merupakan tinjauan ulang dari hasil penelitian yang telah diteliti untuk proses berlangsungnya permasalahan yang ingin diungkap. Penelitian terdahulu bermanfaat sebagai pertimbangan dari kaitan penelitian yang hendak dilakukan. Dari tinjauan empiris yang tersaji oleh peneliti untuk membahas permasalahan, didapat beberapa penelitian terdahulu yaitu :

1. Riduansyah (2003)

Dari judul penelitian yang dilakukan oleh Riduansyah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dapat di simpulkan sebagaimana hasil dari penelitian tersebut adalah Dari data yang diperoleh, terlihat bahwa kontribusi komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap penerimaan APBD Pemerintah Daerah Kota Bogor sangat fluktuatif. Hal ini banyak diakibatkan karena terjadinya perubahan peraturan per Undang Undangan dalam kurun waktu rahun angaran 1993/1994 – 2000, terakhir dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai revisi dari Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997. Pemberlakuan Undang Undang yang berbeda beda ini menyebabkan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalami banyak perubahan, antara lain menyebabkan penghapusan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan disaat yang sama

juga memberikan peluang dimungkinkannya ditarik jenis retribusi maupun Pajak Daerah yang baru.

2. Hekti (2010)

Dari judul Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pajak Daerah Serta Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Dalam Pemungutan studi kasus di Kabupaten Karanganyar dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif berisi Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh, efisiensi pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Karanganyar tahun 2002-2008 adalah sebagai berikut : (1) efisiensi pajak hotel adalah 5,04 % yang berarti sangat efisien, (2) efisiensi pajak hiburan adalah 4,47 % yang berarti sangat efisien, (3) efisiensi pajak bahan galian golongan C adalah 4,25 % yang berarti sangat efisien, (4) efisiensi pajak penerangan jalan adalah 4,08 % yang berarti sangat efisien, (5) efisiensi pajak reklame adalah 3,76 % yang berarti sangat efisien, (6) efisiensi pajak parkir adalah 3,50 % yang berarti sangat efisien, dan (7) efisiensi pajak restoran adalah 3,31 % yang berarti sangat efisien.

3. Nugroho (2011)

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dengan judul “Analisis Peran Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Probolinggo” dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berisi kontribusi Pajak Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Kota Probolinggo selama 3

tahun. Dan hasil dari penelitian tersebut yang berisi Pajak Daerah dalam peningkatan Anggaran Pendapatan masih sangat rendah yaitu sebesar 2,47%. Selain itu dari hasil analisis yang dipaparkan ini menunjukkan bahwa apabila Pajak Daerah meningkat, maka PAD dan Anggaran Pendapatan Daerah juga ikut meningkat.

4. Kristiyanti (2012)

Jurnal yang berjudul "Peran Strategis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pembangunan Nasional" berisi Salah satu upaya yang dapat dilakukan UKM agar tetap terus berkembang adalah melalui hubungan kerjasama dengan Usaha Besar (UB). Kesadaran akan kerjasama ini telah melahirkan konsep *supply chain management* (SCM) pada tahun 1990-an. *Supply chain* pada dasarnya merupakan jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Pentingnya persahabatan, kesetiaan, dan rasa saling percaya antara industri yang satu dengan lainnya untuk menciptakan ruang pasar tanpa pesaing, yang kemudian memunculkan konsep *blue ocean strategy*. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

5. Lasut (2014)

Dari judul "Efektifitas Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon" dengan menggunakan metode kuantitatif yang diambil oleh

peneliti dapat ditemukan hasil penelitian Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon selama 5 (lima) Tahun Anggaran (2009-2013) Pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 PAD Kota Tomohon belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu pada Tahun 2009 hanya mencapai 78,53% dari target Rp. 6.992.372.100, pada Tahun 2010 80,05% dari target Rp. 7.137.372.100. Pada tahun 2011 pencapaian 99,48% dari target Rp. 8.137.372.100 hampir memenuhi 100% dari target yang di tetapkan. Pada tahun 2012 prosentase pencapaiannya 101,72% yaitu melebihi target yang ditetapkan. Dan pada tahun 2013 prosentase pencapaiannya 109,80%, dari target Rp.12.700.975.000. Dari data tersebut, diketahui bahwa realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terjadi kenaikan sebesar 1,71% pada tahun 2010, tahun 2011 mengalami penurunan sebesar -4,52%, dan pada tahun 2012 kembali mengalami kenaikan sebesar 22,02%. Kemudian pada tahun 2013, realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kembali mengalami penurunan sebesar -33,55%..

Tabel 2 Tinjauan Empiris Penelitian Terdahulu

No	Penelitian terdahulu	Persamaan		Perbedaan	
		Terdahulu	Sekarang	Terdahulu	Sekarang
1	Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD dan APBD Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (studi kasus pada pemda kota Bogor) – Riduansyah, 2003	1. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif 2. Meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah.	1. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 2. Meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah yang berfokus pada pajak mineral bukan logam dan batuan.	Menganalisis tentang pajak dan retribusi daerah demi meningkatkan PAD	Menganalisis penelitian tentang pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah
2	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah Serta Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Dalam Pemungutan (studi kasus pada Kabupaten Karanganyar) – Hekti, 2010	1. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 2. Menganalisis tentang efektifitas pemungutan pajak daerah	1. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 2. Menganalisis tentang efektifitas pemungutan pajak daerah khususnya di dalam pajak mineral bukan logam dan batuan.	Menganalisis tentang factor yang mempengaruhi pemungutan pajak demi mempengaruhi PAD	Menganalisis penelitian tentang pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan		Perbedaan	
		Terdahulu	Sekarang	Dahulu	Skarang
3	Analisis Peranan Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan PAD Kota Probolinggo-Nugroho, 2011	1. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 2. Peranan pajak daerah dalam meningkatkan PAD	1. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 2. Penerapan pajak sebagai aplikasi pembangunan daerah.	Menganalisis peranan pajak daerah demi meningkatkan PAD	Menganalisis penelitian tentang pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah
4	Peran Strategis UMKM Dalam Pembangunan Nasional – Kristianti, 2012	1. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 2. Membahas tentang peran UMKM dalam peningkatan pendapatan daerah	1. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 2. Menjelaskan tentang unit usaha kerja di dalam pajak mineral bukan logam dan batuan khususnya di sektor garam.	Menganalisis pemungutan pajak UMKM demi meningkatkan PAD	Menganalisis penelitian tentang pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah
5	Efektifitas Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Sumber PAD (studi kasus pada Kota Tomohon) – Lasut, 2014	1. Meneliti tentang pajak mineral bukan logam dan batuan	1. Menganalisis tentang pajak mineral bukan logam dan batuan khususnya di sektor garam	1. Metode penelitian kuantitatif. 2. Menganalisis penelitian tentang pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai sumber PAD	Menganalisis penelitian tentang pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah

B. Tinjauan Teoritis

1. Otonomi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 32 pasal 1 ayat 5 tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai undang-undang tersebut, prinsip dalam menyelenggarakan otonomi daerah dibagi menjadi 3, yaitu:

- a) Prinsip otonomi seluas-luasnya, dimana daerah diberikan wewenang mengurus dan mengatur semua organ pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang.
- b) Prinsip otonomi nyata, yang berarti bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh hidup dan berkembang sesuai kekhasan daerah.
- c) Prinsip otonomi bertanggung jawab, dimana penyelenggaraan otonomi harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.

Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah diarahkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain itu melalui otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan

keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Mardiasmo (2002) pemberian otonomi daerah merupakan langkah yang tepat untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengolah dan membangun daerahnya melalui usaha-usaha yang mampu untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah juga mengharuskan suatu daerah dapat mengelola segala potensi yang dimiliki secara optimal karena dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat 3 misi utama yang mendasarinya, yaitu:

- a) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
- c) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah merupakan kebijakan yang tepat dan membuka peluang serta tantangan bagi daerah untuk melaksanakan kewenangan atau urusan yang dilimpahkan pusat dengan dilandasi prinsip *good governance*. Ketika suatu daerah dapat memanfaatkan kebijakan dan peluang ini dengan baik maka daerah tersebut dapat lebih maju dan mandiri. Sebaliknya, daerah yang tidak dapat memanfaatkan kebijakan dan peluang ini maka daerah tersebut tidak akan memberikan perubahan dan daerah tersebut tidak akan maju dan mandiri.

b). Konsep Pembangunan

Penggunaan indikator dan variabel pembangunan bisa berbeda untuk setiap negara. Di negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indikator pembangunan akan bergeser kepada faktor-faktor sekunder dan tersier (Tikson, 2005).

Sejumlah indikator ekonomi yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga internasional antara lain pendapatan perkapita (GNP atau PDB), struktur perekonomian, urbanisasi, dan jumlah tabungan. Disamping itu terdapat pula dua indikator lainnya yang menunjukkan kemajuan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa atau daerah yaitu Indeks Kualitas Hidup (IKH atau PQLI) dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI).

2. Desentralisasi

a. Definisi Desentralisasi Fiskal

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 7 dan Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 8, “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut Saragih (2003: 83), Desentralisasi fiskal secara

singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

Desentralisasi fiskal menurut Macfud Sidik (2001), desentralisasi fiskal adalah suatu alat untuk mencapai salah satu tujuan negara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Hal pokok tentang desentralisasi pada dasarnya adalah apakah desain, proses, dan implementasi desentralisasi tersebut berhasil atau gagal untuk meningkatkan efisiensi dan kadar responsifikasi kebijakan publik pemerintah terhadap kepentingan politis, ekonomi, dan sosial masyarakatnya. Kegagalan implementasi desentralisasi ditunjukkan dari kemunduran ekonomi, ketidakstabilan politik, dan merosotnya kualitas pelayanan publik di Negara yang bersangkutan.

b. Konsep Desentralisasi Fiskal

Menurut Mardiasmo (2002) secara teoritis, ada dua manfaat yang dapat diharapkan dari Desentralisasi Fiskal yaitu :

1. Mendorong partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat di dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah.

2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Menurut Simanjuntak (2002) sasaran desentralisasi fiskal di Indonesia secara umum adalah:

1. Untuk memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber-sumber keuangan daerah.
 - a. Mendorong akuntabilitas, dan transparansi pemerintah daerah.
 - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
 - c. Mengurangi krtimpangan antar daerah.
 - d. Menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah.
 - e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Menurut Suparmoko (2000), Tujuan kebijakan desentralisasi adalah :

1. Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat.
3. Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah

c. Aspek Desentralisasi

Machfud Sidik (2002) menyatakan bahwa “Secara umum desentralisasi mencakup aspek-aspek politik (*political decentralization*); administratif (*administrative decentralization*); fiskal (*fiscal decentralization*) dan ekonomi (*economic or market decentralization*).” Dari keempat aspek desentralisasi tersebut, desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi. Pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik harus diberikan keleluasaan dalam menentukan kebijakan fiskal daerahnya.

d. Pra-Syarat Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal

Menurut Machfud Sidik (2002) Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik kalau didukung faktor-faktor berikut: (1) Pemerintah Pusat yang mampu melakukan pengawasan dan enforcement, (2) SDM yang kuat pada Pemda guna menggantikan peran Pemerintah Pusat, (3) Keseimbangan dan kejelasan dalam pembagian tanggung jawab dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah. Jadi pemilihan azas penyelenggaraan pemerintahan tergantung pada kebutuhan suatu negara. Kebutuhan inilah yang menimbulkan alasan penggunaan azas desentralisasi fiskal. Pilihan penggunaan azas desentralisasi fiskal dikarenakan azas tersebut dianggap yang paling banyak membawa manfaat bagi negara tersebut. Selanjutnya keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal ditentukan oleh beberapa faktor pendukungnya.

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Davey (1988:39-40) ada beberapa pengertian tentang pajak daerah antara lain :

- 1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
- 2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- 3) Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah;
- 4) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasilnya diberikan kepada, dibagihasilkan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemerintah Daerah

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah kota/kabupaten kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Secara umum, pajak merupakan iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena undang-undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk (Kesit Bambang Prakosa, 2005:2). Dalam konteks desentralisasi, maka muncullah yang disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah. Pembagian ini berdasarkan klasifikasi menurut wewenang pemungutnya, yaitu pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat, dan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah. Untuk Indonesia saat ini, pajak daerah ini dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Kewenangan memungut pajak daerah ini sejalan dengan dikembalikannya wewenang kepada daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahannya dalam penyelenggaraan otonomi.

b. Jenis-jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Prakosa (2005:77) dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Pajak Propinsi, terdiri dari:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air di Bawah Tanah dan Air Permukaan.
 - e) Pajak Rokok
- 2) Pajak Kabupaten/ Kota
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - g) Pajak Parkir

Sedangkan jenis-jenis pajak daerah Kabupaten/Kota menurut UU nomor 28 tahun 2009 antara lain:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Undang-Undang PDRD Tahun 2009 mengatur bahwa pajak provinsi terdiri atas lima jenis pajak. Sedangkan pajak untuk kabupaten/kota ada sebelas jenis. Undang-undang ini menutup kemungkinan bagi daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menarik pajak lain selain yang tercantum dalam undang-undang ini (*closed list*). Perubahan mendasar dalam Undang-Undang

PDRD terbaru ini yaitu diserahkannya kewenangan untuk mengatur, memungut dan mengadministrasikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada daerah kabupaten/kota sebagai pajak daerah, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan selain Perdesaan dan Perkotaan, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan, tetap menjadi pajak pusat.

Menurut Davey (1988), untuk menentukan suatu potensi pajak sebagai penerimaan daerah, ada 5 (lima) kriteria yang harus dipenuhi, yaitu kecukupan dan elastisitas, keadilan, kemampuan administratif, kesepakatan politis dan kecocokan sebagai pajak daerah. Ke lima kriteria tersebut didapatkan mampu meningkatkan ataupun mensejahterakan masyarakat melalui pajak daerah yang dipungut pemerintah dalam sector pembangunan.

1. Kecukupan dan elastisitas merupakan persyaratan pertama yang harus dipenuhi yaitu bahwa sumber pendapatan melalui sector pajak tersebut harus menghasilkan pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Pajak diharapkan menunjukkan elastisitasnya, yaitu kemampuan menghasilkan tambahan pendapatan bagi pemerintah agar dapat menutup kenaikan pengeluaran pemerintah. Juga diharapkan dasar pengenaan pajak berkembang secara otomatis misalnya ada kenaikan harga pokok dan pendapatan per orangan juga diharapkan bertambah, agar dapat memenuhi kebutuhan sehari hari dan kewajiban untuk membayar pajak kedepannya.
2. Keadilan. Prinsipnya yaitu beban pengeluaran pemerintah harus ditanggung semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Keadilan dalam perpajakan di daerah mempunyai 3 (tiga) dimensi. Dimensi pertama yaitu keadilan vertikal, hubungan dalam pembebanan pajak atas tingkat pendapatan yang berbeda-beda. Secara umum, pajak dikatakan baik jika bersifat progresif, yaitu persentase pendapatan seseorang yang dibayarkan untuk pajak bertambah sesuai dengan tingkat pendapatannya. Dimensi kedua adalah keadilan horizontal

atau hubungan pembebanan pajak dengan sumber pendapatan. Dalam dimensi ini, perbedaan sumber pendapatan tidak mengakibatkan perbedaan besarnya pajak yang harus dibayar. Dalam jumlah pendapatan yang sama, maka besarnya pajak yang dibayar juga sama, tidak memandang sumbernya. Dimensi ketiga yaitu keadilan geografis. Pembebanan pajak harus adil antarpendinguduk di berbagai daerah. Masyarakat seharusnya tidak dibebani pajak lebih berat karena mereka tinggal di perbatasan kota. Pembebanan yang adil dari suatu pajak dipengaruhi oleh ruang lingkupnya siapa yang membayar dan jenis pendapatan, kekayaan dan sebagainya yang dikenakan pajak— dan struktur tarifnya. Selain itu juga tergantung pada metode penetapan dan tingkat ketepatan perhitungan kekayaan masing-masing pemilik. Setiap ketidaktepatan dalam penetapan pajak dapat menyebabkan ketidakadilan, karena orang akan membayar pajak lebih atau kurang dari yang seharusnya dibayar, ketidakadilan tersebut akan dirasakan tergantung pada tarif pajaknya. Namun yang paling penting adalah distribusi keseluruhan beban pajak terhadap masyarakat.

3. Kemampuan administratif. Sumber pendapatan yang berbeda-beda oleh kalangan masyarakat dalam jumlah yang berbeda integritas dan keputusan yang diperlukan dalam administrasinya. Pajak juga berbeda-beda dalam waktu dan biaya yang diperlukan dalam menetapkan dan memungutnya dibandingkan dengan hasilnya. Dan diharapkan dari hasil keputusan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, masyarakat mampu membayar berapa kisaran nilai pajak yang harus dibayar seharusnya.
4. Kesepakatan politis. Kemauan politis diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar. Keseluruhan hal ini bergantung pada faktor kejelasan dari pajak tersebut dan adanya keleluasaan dalam mengambil keputusan. Usaha yang sering dilakukan untuk membuat pajak lebih diterima yaitu dengan mengaitkan penggunaannya secara langsung (*earmarking*) yaitu dengan meningkatkan suatu pungutan untuk membiayai pelayanan tertentu. Dalam jangka panjang, pengkaitan pajak dengan pelayanan yang diberikan dapat bersifat tidak produktif. Hal itu akan mengundang orang untuk membandingkan antara jumlah yang mereka bayar dengan manfaat yang mereka terima.
5. Kecocokan sebagai pajak daerah. Dalam hal ini, teori *Development from Below* berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada daerah daripada kepada pemerintah pusat karena mereka dapat melihat manfaat dalam kemudahan dan pembangunan di daerah mereka. Dan makin rendah tingkat

pemerintahan, maka makin dekat mereka yang mengenakan pajak dengan mereka yang membayar pajak.

Alokasi tanggung jawab untuk melaksanakan pengenaan dan pemungutan pajak tergantung pada sejumlah faktor. Salah satunya adalah tingkat kemampuan yang dibutuhkan dan tersedianya tenaga tersebut di tingkat daerah tertentu. Faktor lain adalah sejauh mana orang daerah atau desakan politis terhadap keadilan dan ketegasan dalam proses pemungutan pajak tersebut. Pajak atas harta tetap sesuai dengan pengenaan oleh pemerintah daerah.

c). Dasar Hukum

Pajak daerah di Indonesia, terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau biasa disebut dengan Undang-Undang PDRD. Undang-undang ini menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam peraturan ini, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur.

Sebagai salah satu tujuan yang hendak dicapai di dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi Daerah, jargon tentang kemandirian Daerah bukan hal yang baru. Secara teoritis pengukuran kemandirian Daerah diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan Undang Undang No 22 tahun 1999 disebutkan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

- 1) Hasil Pajak Daerah
- 2) Hasil Retribusi Daerah
- 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan
- 4) Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Namun di dalam perkembangan selanjutnya, diantara semua komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak dan retribusi daerah merupakan penyumbang terbesar, sehingga muncul anggapan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) identik dengan pajak dan retribusi Daerah. Menurut Halim dalam Erlangga A. Landiyanto (2005), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan suatu otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk mengelolah pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. PAD mencerminkan *local taxing power* sebagai *necessary condition* bagi terwujudnya otonomi daerah yang luas. Jadi keinginan daerah untuk meningkatkan penerimaan dari pajak dan retribusi adalah legal dengan tetap memenuhi prinsip keuangan negara (perpajakan) agar pajak dan retribusi daerah tidak distortif dan menyebabkan inefisiensi ekonomi (Simanjuntak, 2005).

b. Konsep dan Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai atau membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang ada di daerah atau penyerahan wewenang Pemerintahan Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (5) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

1) Pajak Daerah

Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

Kewenangan pemungutan pajak daerah merupakan kewenangan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah, pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk itu,

pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap menempatkan sesuai dengan fungsinya.

2) Retribusi Daerah

Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu. Retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor kekas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah

pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah.

4) Pendapatan Asli Daerah Lain-lain Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana yang dimaksud di dalam peraturan perundang undangan di bidang mineral batu bara.

a. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Objek pajak yang termasuk mineral bukan logam meliputi:

- 1) Asbes;
- 2) Bentonit;
- 3) Dolomit;
- 4) Feldspar;
- 5) Garam Batu (*Halite*);

- 6) Grafit;
- 7) Gips;
- 8) Kalsit;
- 9) Kaolin;
- 10) Magnesit;
- 11) Mika;
- 12) Marmer;
- 13) Nitrat;
- 14) Opsidien;
- 15) Oker;
- 16) Pasir Kuarsa;
- 17) Perlit;
- 18) Phospat;
- 19) Talk;
- 20) Tawas (*Alum*);
- 21) Yarosif;
- 22) Zeolit;
- 23) Mineral Bukan Logam lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Objek pajak yang termasuk batuan meliputi:

- 1) Batu Tulis;
- 2) Batu Setengah Permata;
- 3) Batu Kapur;
- 4) Batu Apung;
- 5) Batu Permata;
- 6) Granit/Andesit;
- 7) Leusit;
- 8) Pasir Dan Kerikil;
- 9) Tanah Serap (*Fullers Earth*);
- 10) Tanah Diatome;
- 11) Tanah Liat;
- 12) Tras;
- 13) Basal;
- 14) Trakkit; Dan
- 15) Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Pengecualian dari Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- 1) Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/ telepon, penanaman kabel listrik/ telepon, penanaman pipa air/gas; dan
- 2) Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

c. Subjek Pajak

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.

d. Wajib Pajak

Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang Pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

e. Dasar Pengenaan Pajak

- 1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- 2) Nilai jual yang dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
 1. Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.

2. Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

f. Tarif Pajak

Tarif pajak untuk mineral bukan logam ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Tarif pajak untuk batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

g. Masa Pajak

Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

6. Peran

a. Definisi Peran

Menurut Soerjono Soekanto Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2009:212-213).

Pengertian tentang peranan yang dikemukakan oleh Komarudin (1994:768) dapat didefinisikan sebagai berikut :

- 1) Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam manajemen.
- 2) Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu usaha.
- 3) Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.

- 4) Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang adanya padanya.
- 5) Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

b. Teori Peran

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2002). Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu.

Menurut Biddle dan Thomas (1966) teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu menyangkut :

- 1) Orang - orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
- 2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
- 3) Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
- 4) Kaitan antara orang dan perilaku.

c. Peran Pemerintah Sebagai Pelaku Ekonomi

Pemerintah adalah badan-badan pemerintah yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Seperti halnya rumah tangga keluarga dan perusahaan, pemerintah juga sebagai pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi.

1) Kegiatan Konsumsi Pemerintah

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya membutuhkan barang dan jasa. Kegiatan konsumsi pemerintah dapat berupa kegiatan membeli alat-alat tulis kantor, membeli alat-alat kedokteran, membeli peralatan yang menunjang pendidikan, menggunakan tenaga kerja untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah, dan sebagainya.

2) Kegiatan Produksi Pemerintah

Pemerintah ikut berperan dalam menghasilkan barang dan atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal tersebut sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (2), yang berbunyi: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

Pelaksanaan peran pemerintah dalam kegiatan produksi diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor perekonomian. Sebagai

pelaksana kegiatan produksi pemerintah mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berikut ini maksud dan tujuan pendirian BUMN berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2003.

- a) Memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
- b) Mencari keuntungan.
- c) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi orang banyak.
- d) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
- e) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Pemerintah juga berperan sebagai pengatur dan pelaksana kebijakan. Peran pemerintah sebagai pengatur yaitu dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Tujuan dibuatnya peraturan adalah agar kegiatan-kegiatan ekonomi dijalankan secara wajar dan tidak merugikan masyarakat.

7. Garam

a) Pengertian Garam

Pengertian garam secara fisik, garam adalah benda padatan berwarna putih berbentuk kristal yang merupakan kumpulan senyawa dengan bagian terbesar Natrium Chlorida (>80%) serta senyawa lainnya seperti Magnesium

Chlorida, Magnesium Sulfat, Calcium Chlorida, dan lain-lain. Garam mempunyai sifat / karakteristik higroskopis yang berarti mudah menyerap air, bulk density (tingkat kepadatan) sebesar 0,8 - 0,9 dan titik lebur pada tingkat suhu 8010 C (Burhanuddin, 2001). Garam Natrium klorida untuk keperluan masak dan biasanya diperkaya dengan unsur iodin (dengan menambahkan 5 g NaI per kg NaCl) padatan Kristal berwarna putih, berasa asin, tidak higroskopis, bila mengandung $MgCl_2$ menjadi berasa agak pahit dan higroskopis. Digunakan terutama sebagai bumbu penting untuk makanan, sebagai bumbu penting untuk makanan, bahan baku pembuatan logam Na dan NaOH (bahan untuk pembuatan keramik, kaca, dan pupuk), sebagai zat pengawet (Mulyono 2009)

b) Sumber Garam

Sumber garam yang didapat dialam berasal dari : 1. Air laut, air danau asin Yang bersumber air laut terdapat di Mexico, Brazilia, RRC, Australia dan Indonesia yang mencapai $\pm 40 \%$. Adapun yang bersumber dari danau asin terdapat di Yordania (Laut Mati), Amerika Serikat (Great Salt Lake) dan Australia yang mencapai produksi $\pm 20 \%$ dari total produk dunia. 2. Deposit dalam tanah, tambang garam Terdapat di Amerika Serikat, Belanda, RRC, Thailand, yang mencapai produksi $\pm 40 \%$ total produk dunia. 3. Sumber air dalam tanah Sangat kecil, karena sampai saat ini dinilai kurang ekonomis maka jarang (sama sekali tidak) dijadikan pilihan usaha. Di Indonesia terdapat sumber air garam di wilayah Purwodadi, Jawa Tengah (Burhanuddin, 2001).

c) Teknologi Pembuatan Garam

1. Garam dari air laut dan air danau asin, teknologi proses yang digunakan :

(a) Penguapan melalui teknologi matahari (*solar evaporation*). (b) Proses pemisahan NaCl dengan aliran listrik (*elektrodialisa*).

6. Garam Tambang, teknologi proses yang digunakan: Langsung dilakukan pencucian terhadap hasil penambangan (*washing plants*), kemudian dilakukan pengeringan dengan centrifuge sampai mencapai Universitas Sumatera Utara kadar air 3 – 5 % (untuk menghasilkan garam bahan baku/garam kasar), dilanjutkan proses pengeringan lanjutan (*drying*). hasil penambangan dilarutkan dalam air atau dapat juga dicairkan pada saat masih dibawah permukaan tanah. Kemudian larutan garam tersebut dijernihkan (sesedikit mungkin mengandung kotoran dan senyawa kimia yang dikehendaki), dan selanjutnya dikristalkan kembali dalam kolom kristalisasi (*crystallization column*), hasil rekristalisasi dikeringkan dikeringkan dan seterusnya seperti pada proses sebelumnya. (Burhanuddin, 2001).

Kristalisasi merupakan istilah yang menunjukkan beberapa fenomena yang berbeda berkaitan dengan pembentukan struktur kristal. Empat tahap pada proses kristalisasi meliputi pembentukan kondisi lewat jenuh atau lewat dingin, nukleasi atau pembentukan kristal inti kristal, pertumbuhan kristal, dan rekristalisasi atau pengaturan kembali struktur

kristalin sampai mencapai energi terendah. Kristalisasi menunjukkan sejumlah fenomena yang berkaitan dengan pembentukan struktur matriks kristal. Prinsip pembentukan kristal adalah sebagai berikut:

1. Kondisi lewat jenuh untuk suatu larutan seperti larutan gula atau garam.
2. Kondisi lewat dingin untuk suatu cairan atau lelehan (*melt*) seperti air dan lemak. Untuk membentuk kristal, fase cairan (*liquid*) harus melewati kondisi lewat dingin (untuk lelehan). Kondisi tersebut dapat tercapai melalui pendinginan dibawah titik leleh suatu komponen (misalnya air) atau melalui penambahan Universitas Sumatera Utara sehingga dicapai kondisi lewat jenuh (misalnya garam dan gula) pada kondisi tidak seimbang ini, molekul-molekul pada cairan yang mengatur diri dan membentuk struktur matriks kristal. Kondisi lewat jenuh atau lewat dingin pada produk pangan diatur melalui proses formulasi atau kondisi lapangan. (Estiasih, 2009).

d) Jenis Garam

1. Garam Industri, Garam dengan kadar NaCl yaitu 97 % dengan kandungan impurities (sulfat, magnesium dan kalsium serta kotoran lainnya) yang sangat kecil. kebutuhan garam industri antara lain untuk industri perminyakan, pembuatan soda dan chlor, penyamakan kulit dan *pharmaceutical salt*.
2. Garam Konsumsi, Garam dengan kadar NaCl, yaitu 97 % atas dasar bahan kering (*dry basis*), kandungan impuritis (sulfat, magnesium dan kalsium), yaitu 2%, dan kotoran lainnya (lumpur, pasir), yaitu 1% serta kadar air maksimal yaitu 7%. Kelompok kebutuhan garam konsumsi antara lain untuk konsumsi rumah tangga, industri makanan, industri minyak goreng, industri pengasinan dan pengawaten ikan (Burhanuddin, 2001).

3. Garam Pengawetan, Garam biasa ditambahkan pada proses pengolahan pangan tertentu. Penambahan garam tersebut bertujuan untuk mendapatkan kondisi tertentu yang Universitas Sumatera Utara memungkinkan enzim atau mikroorganisme yang tahan garam (halotoleran) bereaksi menghasilkan produk makanan dengan karakteristik tertentu. Kadar garam yang tinggi menyebabkan mikroorganisme yang tidak tahan terhadap garam akan mati. Kondisi selektif ini memungkinkan mikroorganisme yang tahan garam dapat tumbuh. Pada kondisi tertentu penambahan garam berfungsi mengawetkan karena kadar garam yang tinggi menghasilkan tekanan osmotik yang tinggi dan aktivitas air rendah. Kondisi ekstrim ini menyebabkan kebanyakan mikroorganisme tidak dapat hidup. Pengolahan dengan garam biasanya merupakan kombinasi dengan pengolahan yang lain seperti fermentasi dan enzimatik. Contoh pengolahan pangan dengan garam adalah pengolahan acar (*pickle*), pembuatan kecap ikan, pembuatan daging kering, dan pembuatan keju (Estiasih, 2009).

8. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a) Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Iman dan Adi, 2009).

Usaha Mikro Kecil dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kementerian Koperasi dan UKM mengelompokkan usaha mikro kecil dan menengah menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan total asset, total penjualan tahunan, dan status usaha dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal, dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan bisnis tersebut paling banyak Rp. 100 juta.

2) Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria antara lain:

1. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 milyar.
3. Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar.
4. Berbentuk usaha yang dimiliki orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

b) Tujuan dan Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Tujuan usaha mikro menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Usaha mikro mempunyai peran yang penting dalam pembangunan ekonomi, karena intensitas tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dan investasi yang lebih kecil, sehingga usaha mikro lebih fleksibel dalam menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Hal ini menyebabkan usaha mikro tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan eksternal, karena dapat mengurangi impor dan memiliki kandungan lokal yang tinggi. Oleh karena

itu pengembangan usaha mikro dapat memberikan kontribusi pada diversifikasi ekonomi dan perubahan struktur sebagai prakondisi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. Disamping itu tingkat penciptaan lapangan kerja lebih tinggi pada usaha mikro dari pada yang terjadi di perusahaan besar (Sutrisno dan Sri, 2006). Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari (Kementerian Koperasi dan UKM, 2005 dalam Neddy, 2006):

- 1) Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor penyedia lapangan kerja yang terbesar
- 2) Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat
- 3) Pencipta pasar baru dan sumber inovasi
- 4) Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian nasional. Beberapa peran strategis UMKM menurut Bank Indonesia antara lain: jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi; menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja; memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau.

c) Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Penelitian yang dilakukan LM-FEUI (Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia) pada tahun 1994 menemukan karakteristik

usaha kecil (mikro) di Indonesia sebagai berikut (Ahmad, n.d dalam afifah 2012):

- 1) Hampir setengah perusahaan mikro kecil dan menengah hanya menggunakan kapasitas terpasang 60% atau kurang karena kesalahan dalam perencanaan dan ketidak mampuan memperbesar pasar, dan lebih dari setengah perusahaan kecil didirikan sebagai pengembangan usaha kecil-kecilan.
- 2) Masalah utama yang dihadapi berbeda menurut tahap pengembangan usaha. Pada masa pengembangan (sebelum investasi) terdapat dua masalah yaitu, permodalan dan kemudahan berusaha (lokasi dan perijinan). Pada tahapselanjutnya sektor usaha UMKM menghadapi kendala permodalan dan pengadaan bahan baku. Selain hal itu juga karena kurangnya keterampilan teknis dan administrasi.
- 3) Tingkat ketergantungan terhadap bantuan pemerintah berupa permodalan, pemasaran dan pengadaan bahan baku relatif masih tinggi.
- 4) Hampir 60% masih menggunakan teknologi tradisional.
- 5) Hampir 70% usaha kecil melakukan pemasaran langsung terhadap konsumen.
- 6) Sebagian besar pengusaha UMKM dalam memperoleh bantuan perbankan merasa rumit dan dokumen yang harus disiapkan sukar dipenuhi.

d) Tantangan dan Permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Sebagaimana diketahui dari berbagai studi, bahwa dalam mengembangkan usahanya, UMKM menghadapi berbagai kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal, permasalahan-permasalahan tersebut antara lain: aksesibilitas, manajemen, permodalan, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, birokrasi dan pungutan, kemitraan. Dari

beragamnya permasalahan yang dihadapi UMKM, nampaknya permodalan tetap menjadi salah satu kebutuhan penting guna menjalankan usahanya, baik kebutuhan modal kerja maupun investasi (Sri, n.d dalam afifah 2012).

Menurut Dwiwinarno (2008 dalam Haryadi, 2010), ada beberapa faktor penghambat berkembangnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) antara lain kurangnya modal dan kemampuan manajerial yang rendah. Meskipun permintaan atas usaha mereka meningkat karena terkendala dana maka sering kali tidak bisa untuk memenuhi permintaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan untuk mendapatkan informasi tentang tata cara mendapatkan dana dan keterbatasan kemampuan dalam membuat usulan untuk mendapatkan dana.

Kebanyakan UMKM dalam menjalankan usaha tanpa adanya perencanaan, pengendalian maupun juga evaluasi kegiatan usaha. Menurut Andang, (2007) dalam afifah (2012), permasalahan UMKM dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Permasalahan yang bersifat klasik dan mendasar pada UMKM (*basic problems*), antara lain berupa permasalahan modal, bentuk badan hukum yang umumnya non formal, sumber daya manusia (SDM), pengembangan produk dan akses pemasaran;
- 2) Permasalahan lanjutan (*advanced problems*), antara lain pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan

hukum yang menyangkut hak paten, prosedur kontrak penjualan serta peraturan yang berlaku di negara tujuan ekspor;

- 3) Permasalahan antara (*intermediate problems*), yaitu permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah dasar agar mampu menghadapi persoalan lanjutan secara lebih baik. Permasalahan tersebut antara lain dalam hal manajemen keuangan, agunan dan keterbatasan dalam kewirausahaan.

Hasil studi Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, menunjukkan bahwa usaha mikro memiliki permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut (Joko dan Sri, 2006):

- 1) Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung mengikuti kaidah administrasi standar, sehingga datanya tidak *up to date*. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya menilai kinerja usaha mikro.
- 2) Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat ketat
- 3) Modal terbatas
- 4) Pengalaman manajerial perusahaan terbatas.
- 5) Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan penekanan biaya untuk mencapai efisiensi yang tinggi.
- 6) Kemampuan pemasaran, negosiasi dan diversifikasi pasar yang terbatas.
- 7) Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal yang rendah, karena keterbatasan sistem administrasi.

Menurut Tulus (2002), beberapa permasalahan yang sering dihadapi UMKM, khususnya industri kecil (IK) dan industri rumah tangga (IRT) antara lain:

- 1) Kesulitan pemasaran Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UMKM. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan, baik pasar domestik dari produk serupa buatan usaha besar dan impor, maupun di pasar ekspor.

- 2) Keterbatasan finansial UMKM, khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial: mobilisasi modal awal (*start-up capital*) dan akses ke modal kerja dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. Walaupun pada umumnya modal awal bersumber dari modal (tabungan) sendiri atau sumber-sumber informal, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak cukup untuk kegiatan produksi.
- 3) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek *enterpreunership*, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, *engineering design*, *quality control*, organisasi bisnis, akuntansi, *data processing*, teknik pemasaran, dan penelitian pasar.
- 4) Masalah bahan baku Keterbatasan bahan baku (dan input-input lainnya) juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia. Hal ini dikarenakan jumlah ketersediaan bahan baku yang terbatas serta harga bahan baku yang tinggi
- 5) Keterbatasan teknologi khususnya usaha-usaha rumah tangga (mikro), disebabkan oleh banyak faktor di antaranya, keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru atau untuk menyempurnakan proses produksi, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi atau mesin-mesin dan alat-alat produksi baru, dan keterbatasan SDM yang dapat mengoperasikan mesinmesin baru atau melakukan inovasi-inovasi dalam produk maupun proses produksi.

Persoalan yang sering dihadapi hampir semua pengusaha, karena untuk memulai usaha dibutuhkan pengeluaran sejumlah uang sebagai modal awal. Pengeluaran tersebut untuk membeli bahan baku dan penolong, alat-alat dan fasilitas produksi serta pengeluaran operasional lainnya. Melalui barang-barang yang dibeli tersebut perusahaan dapat menghasilkan sejumlah output yang kemudian dapat dijualnya untuk mendapat sejumlah uang pengembalian modal dan keuntungan.

Tulus (2002) menjelaskan bahwa modal adalah salah satu faktor produksi yang sangat penting bagi setiap usaha, baik skala kecil, menengah maupun besar. Sedangkan Neti (2009) dalam afifah 2012 menyebutkan bahwa dalam memulai suatu usaha, modal merupakan salah satu faktor penting disamping faktor lainnya, sehingga suatu usaha bisa tidak berjalan apabila tidak tersedia modal. Artinya, bahwa suatu usaha tidak akan pernah ada atau tidak dapat berjalan tanpa adanya modal. Hal ini menggambarkan bahwa modal menjadi faktor utama dan penentu dari suatu kegiatan usaha, karenanya setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha, maka langkah utama yang dilakukannya adalah memikirkan dan mencari modal untuk usahanya.

Selain sebagai bagian terpenting di dalam proses produksi, modal juga merupakan faktor utama dan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam pengembangan perusahaan. Hal ini dicapai melalui peningkatan jumlah produksi yang menghasilkan keuntungan atau laba bagi pengusaha (Achmad, 2009).

Dengan tersedianya modal maka usaha akan berjalan lancar sehingga akan mengembangkan modal itu sendiri melalui suatu proses kegiatan usaha. Modal yang digunakan dapat merupakan modal sendiri seluruhnya atau merupakan kombinasi antara modal sendiri dengan modal pinjaman. Kumpulan berbagai sumber modal akan membentuk suatu kekuatan modal yang ditanamkan guna menjalankan usaha. Modal yang dimiliki tersebut jika dikelola secara optimal maka akan meningkatkan volume penjualan (Riyanto, 1985 dalam Achmad, 2009). Terdapat pula adanya penggunaan istilah modal

untuk mengacu kepada arti yang lebih khusus, misalnya modal sosial dan modal manusia.

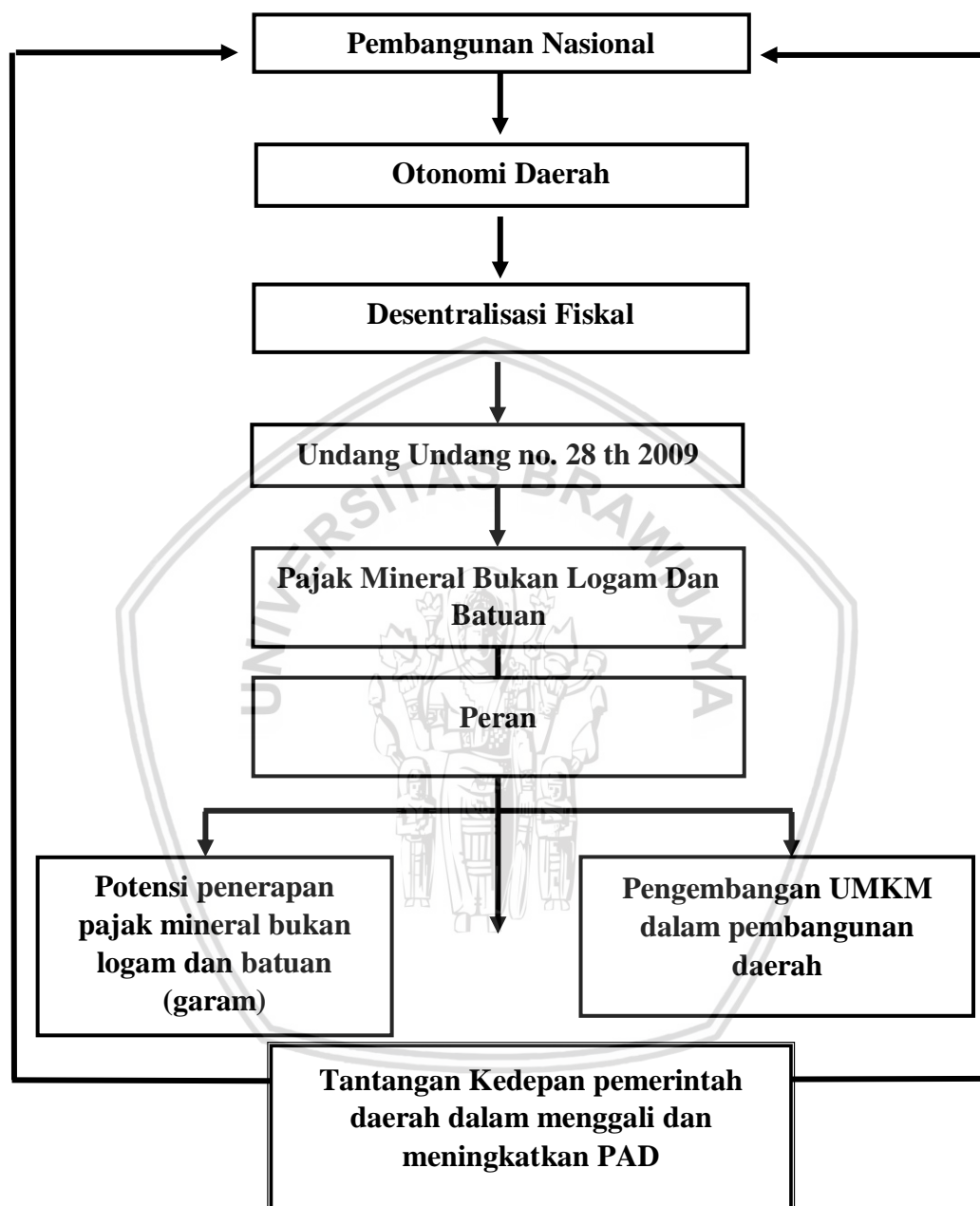
Istilah yang pertama mengacu kepada jenis modal yang tersedia bagi kepentingan umum, seperti rumah sakit, gedung sekolah, jalan raya dan sebagainya, sedangkan istilah yang kedua mengacu kepada faktor manusia produktif yang mencakup faktor kecakapan dan keterampilan manusia. Menyelenggarakan pendidikan misalnya, disebut sebagai suatu investasi dalam modal manusia. Jika dilihat dari definisi diatas dapat dikatakan bahwasanya modal adalah pengeluaran awal untuk melakukan kegiatan usaha yang terdiri dari modal finansial dan modal sosial yang menjadi bagian yang penting untuk keberlangsungan usaha.

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan bagi seorang peneliti dalam melakukan penelitiannya (Nazir, 2011:36). Pada penelitian ini, peneliti akan menjelaskan mengenai pengembangan Pajak Daerah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Probolinggo. Permasalahan yang dialami oleh masyarakat yang mempunyai Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) diharapkan mampu mengangkat kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan memenuhi kewajiban dalam perpajakannya untuk keberlangsungan pengembangan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) sendiri dalam memenuhi pembangunan daerah. Adapun alur dari peneliti untuk menjelaskan kerangka berfikir yang dimiliki adalah sebagai berikut.

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan suatu tujuan yang sebagaimana telah diberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan Undang Undang No.32 tahun 2004 yang kemudian disusul Undang Undang No.33 tahun 2004 menjelaskan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Adanya desentralisasi fiskal yang menyerahkan wewenang sepenuhnya pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur keuangannya sendiri yang di atur oleh Undang Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, apa saja yang bisa dipungut oleh pemerintah daerah yang lepas dari pengawasan pemerintah pusat. Salah satu pungutan pajak yang tertera dalam Undang Undang No.28 tahun 2009 adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimana dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk memungut kegiatan eksploitasi yang dimasukkan dalam kriteria Pajak mineral Bukan Logam dan Batuan yang salah satunya adalah garam. Diharapkan potensi dari air laut yang di eksploitasi menjadi garam grosok dapat dipungut pajak yang akan membantu pemerintah daerah dari segi pendapatan daerahnya. Berikut alur kerangka pemikiran yang digambarkan secara runtut.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu alat untuk mengetahui dan memahami suatu permasalahan secara ilmiah. Penelitian harus menggunakan suatu metode yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti agar menghasilkan data yang relevan dan berkualitas terhadap permasalahan tersebut. Metode yang digunakan oleh penulis untuk meneliti permasalahan adalah metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan Deskriptif untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi. Penulis menggunakan metode tersebut karena sesuai untuk menjelaskan dan memahami tentang judul penulis yang membahas tentang Analisis Peran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) garam sebagai upaya peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Probolinggo (Studi Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo)

Penelitian Kualitatif ini ditujukan untuk menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari Kuantitatif (pengukuran). Pada dasarnya ada tiga komponen dalam penelitian Kualitatif, yaitu : 1). Adanya data yang bisa datang dari berbagai sumber, interview, dan observasi; 2). Adanya analisis atau prosedur-prosedur interpretasi yang berbeda guna memperoleh hasil penemuan atau teori-teori; dan 3). Adanya penulisan dan

laporan-laporan verbal. (Strauss & Corbin, 1997:14). Penelitian Kualitatif pada hakekatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Metode Penelitian Kualitatif sering disebut Metode Penelitian Naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, (Sugiyono, 2014:8).

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam sebuah penelitian berperan sangat penting. Fokus penelitian menurut Moleong (2007:97) adalah “segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian peneliti menemukan serta memilah data mana yang diperlukan untuk suatu penelitian”. Dengan adanya fokus dapat memberikan arah penelitian dan memberikan batasan masalah yang diteliti. Penentuan fokus penelitian yang tepat akan memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Unsur-unsur yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Peran UMKM sektor garam dalam upaya meningkatkan PAD Kabupaten Probolinggo
 - a. Penerapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai upaya peningkatan PAD.
 - b. Peningkatan pendapatan daerah dari Kabupaten Probolinggo dari segi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan khususnya di sektor garam.

2. Pengembangan UMKM di Sektor Garam berdasarkan dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Probolinggo
3. Upaya Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) dalam meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Probolinggo

Fokus Penelitian tersebut memberikan suatu batasan akan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti sehingga memudahkan pelaksanaan. Hal ini agar masalah yang akan diteliti oleh peneliti tidak akan melebar dan pengumpulan data akan dapat dilaksanakan. Menurut (Sanapiah dalam Wijaya, 2011:36), Fokus Penelitian adalah pokok permasalahan awal yang dipilih untuk diteliti dan bagaimana memfokuskannya.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian sebagai objek adalah Kabupaten Probolinggo yang di fokuskan kepada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo. Hal tersebut karena Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Probolinggo yang mengatur terkait Pendapatan Daerah melalui sektor Pajak Daerah. Sebagai Badan yang mengatur dan melayani pendapatan daerah di Kabupaten Probolinggo.

Situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat memperoleh sebuah data dari suatu obyek yang diteliti sehingga dapat memperoleh hasil yang akurat, terjamin kebenarannya. Penelitian ini dilakukan di BPPKAD Kabupaten Probolinggo dan petani garam.

D. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan untuk sebuah penelitian adalah :

1. Informan

Peneliti melakukan observasi dalam menentukan *key informan* sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapaun informan tersebut adalah :

- a) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Probolinggo
- b) Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Probolinggo
- c) Pegawai bagian perpajakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Probolinggo yang bertugas di Sumber Pendapatan Daerah

2. Dokumen

Adalah suatu bahan yang tertulis dalam melengkapi data. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Probolinggo.

3. Tempat dan Peristiwa

Merupakan suatu sumber untuk memperoleh data melalui observasi atau pengamatan langsung di dalam lokasi penelitian yakni di wilayah Kabupaten Probolinggo yang bertempat di Dinas Pendapatan Daerah dan Wajib Pajak di sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Data tersebut kemudian menjadi sebuah sumber dimana akan didapatkan banyak sumber dalam penelitian, dan akan diperoleh hasil penelitian yang lebih berkualitas.

Jenis data tersebut dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang memuat suatu informasi yang dilakukan oleh peneliti melalui sebuah wawancara. Wawancara tersebut dilakukan terhadap Kepala dan Pegawai Dinas Pendapatan Daerah serta Wajib Pajak di Kabupaten Probolinggo, dengan dilakukannya wawancara secara langsung diharapkan dapat memperoleh sebuah data secara langsung yang relevan karena data tersebut langsung diperoleh dari sebuah wawancara.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang pengumpulannya merupakan data hasil usaha sendiri atau data yang diperoleh bukan dari sumber secara langsung, melainkan sudah dikumpulkan oleh pihak lain atau sudah diolah. Data Sekunder yang diperoleh peneliti dari penelitian ini berasal dari dokumen yang bersumber dari : Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Probolinggo serta realisasi anggaran pendapatan daerah tahun 2017 dan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang di gunakan oleh peneliti dalam meneliti masalah ini yaitu metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi.

1. Metode Wawancara

Menurut Noor (2011:138), wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang di wawancarai tetapi dapat juga di berikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Berikut daftar peserta wawancara;

1. Bapak Ir. Susilo Isnadi, MM. (kepala bidang pendapatan BPPKAD)
2. Bapak Achmad Arif (sub bidang penagihan)

2. Metode Observasi

Digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan benda, serta rekaman gambar. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi yang dilakukan oleh peneliti telah disesuaikan dengan objek peneliti serta berlandaskan pada teori yang dimiliki oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo serta petani garam di Desa Sidopekso Kecamatan Kraksaan.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk gambar, arsip foto, peraturan-peraturan, hasil rapat, data di server dan tersimpan di web site yang mempunyai sifat utama tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam (Sujarweni, 2014:33)

F. Instrument Penelitian

Instrument penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan yang di lakukan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Arikunto, 2010:201). Instrument utama pengumpulan data dalam penelitian kualitatif merupakan peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2011:222). Menurut Sugiyono (2011:201), Instrumen penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti sendiri, yang merupakan sarana pengumpul data utama, terutama pada saat proses wawancara dan analisi data, serta peneliti menggunakan alat yang berupa panca indera untuk melakukan pengamatan langsung dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang ada di dalam permasalahan yang terjadi di lapangan.
2. Pedoman Wawancara, merupakan suatu daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada informan. Hal ini dilakukan peneliti untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan pengumpulan data dan juga

berfungsi sebagai pengarah dalam proses wawancara dengan informan secara mendalam.

3. Dokumentasi, digunakan sebagai catatan peneliti dalam melakukan proses pengumpulan data, catatan tersebut berupa file softcopy ataupun file hardcopy. Catatan lapangan dipergunakan untuk mencatat apa yang dilihat, diamati, dialami, dan dipikirkan dalam proses pengumpulan data di lapangan.
4. Alat Dokumentasi, alat dokumentasi dan alat tulis dipergunakan peneliti untuk membantu dalam pencatatan hal-hal penting di lapangan.

G. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2014 :270) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data terdiri atas uji kredibilitas (*credibility*), pengujian *transferability*, pengujian *dependability*, pengujian *konfirmability*. Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data sebagai berikut :

1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Menurut Moleong (2007 :330) *uji kredibilitas* atau disebut juga sebagai *uji derajat* kepercayaan dapat dilakukan dengan menggunakan triangulasi. Dalam Sugiyono (2014:273) triangulasi terdiri dari 3 macam yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi teknik pengumpulan waktu.

Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data, yaitu menguji kredibilitas melalui sumber yang sama melalui teknik yang

berbeda yaitu menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi penerapan *billing system* untuk penyelesaian formalitas impor pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda menggunakan triangulasi sumber yakni dengan melakukan wawancara dengan 3 orang.

2. Pengujian *Transferability*

Moleong (2007: 324) menjelaskan bahwa pengujian *transferability* atau keteralihan dilakukan dengan membuat laporan dengan memberikan rincian yang jelas dan sistematis serta dapat dipercaya. Hal ini dilakukan dengan maksud supaya pembaca dapat dengan jelas memahami hasil penelitian tersebut. Apabila pembaca dapat mengerti dengan jelas tentang hasil penelitian tersebut berarti laporan tersebut memenuhi standar *transferability* (Faisal, 1990).

3. Pengujian *Dependability*

Dalam penelitian kualitatif pengujian *dependability* dilakukan dengan mengaudit seluruh proses penelitian. Audit ini dilakukan oleh auditor independen atau pembimbing.

4. Pengujian *Konfirmability*

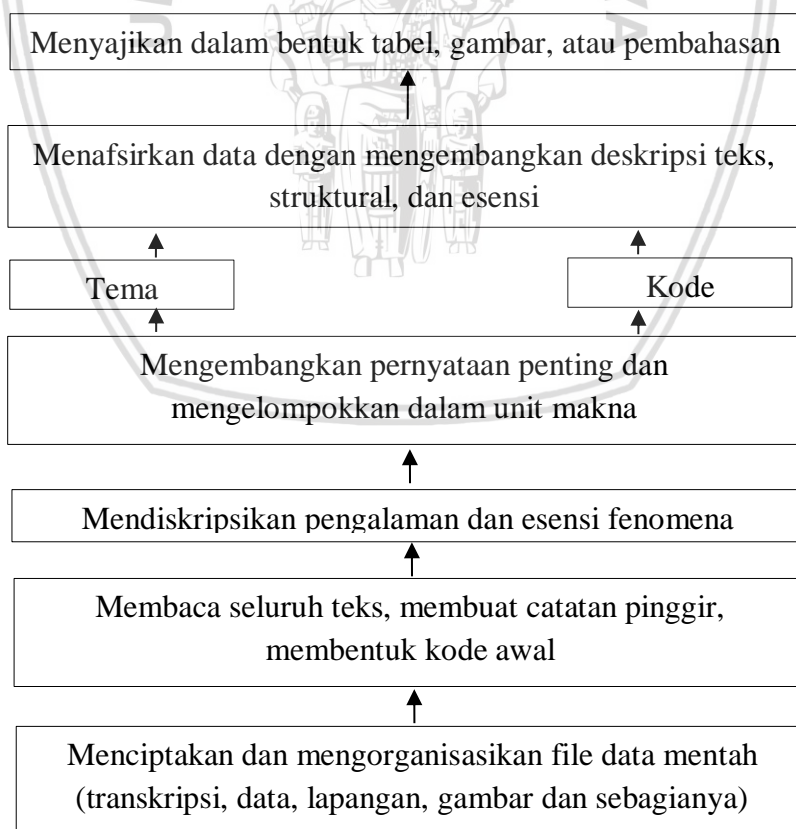
Pengujian *konfirmability* adalah menguji hasil peneliti dengan mengaitkannya pada proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian, maka penelitian tersebut memenuhi standar *konfirmability*. Pengujian ini hampir sama dengan

pengujian *dependability*, sehingga dapat dilaksanakan secara bersama-sama (Sugiyono, 2014:277)

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis menurut Creswell (2015). Teknik ini dipilih untuk meminimilasi masuknya data yang tidak relevan ke dalam hasil penelitian. Selain itu, dengan teknik ini penulis lebih dipermudah untuk menyajikan hasil yang telah dikelompokkan sesuai dengan fokus yang telah ditentukan sebelumnya.

Keabsahan data dalam penelitian ini mengacu kepada teknik analisis data yang dikemukakan oleh Creswell yang digambarkan melalui bagan dibawah ini :



Gambar 1 Analisis Data Kualitatif

Sumber: Creswell, 2015: 264-265 (diolah peneliti, 2017)

Menurut Creswell (2015, 264-265) analisis data dilakukan melalui tahapan:

1. Pengorganisasian data melingkupi, menciptakan dan mengorganisasikan file data mentah berupa transkrip wawancara dan hasil dari data-data sekunder yang dikumpulkan. Data mentah masih belum diolah sehingga masih berbentuk transkrip dan dokumen-dokumen terpisah.
2. Pembacaan atau *memoing* melingkupi kegiatan untuk membaca seluruh teks. Kegiatan pembacaan disertai dengan membuat catatan pinggir dan membentuk kode-kode awal. Tahapan ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam mengelompokkan data-data yang masih mentah.
3. Mendeskripsikan data menjadi kode (*Coding*) dan tema dengan mendeskripsikan pengalaman dan esensi dari fenomena. Kegiatan ini berguna untuk mereduksi data-data yang dianggap tidak berhubungan langsung. Pemberian *coding* tersebut bermaksud untuk mempermudah dalam mengelompokkan data ke dalam fokus penelitian. Adapun *coding* yang telah dibuat sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rumusan *Coding* Reduksi Data

Coding		Keterangan
RM		Rumusan masalah
	RM1	Rumusan masalah ke satu
	RM2	Rumusan masalah ke dua
	RM3	Rumusan Masalah ke tiga
A		Fokus ke satu
B		Fokus ke dua
PERC		Tahap Perencanaan
PERC+ <i>n</i>	PERC. <i>N</i>	Tahapan Perencanaan pada item pertanyaan ke- <i>n</i> .
PERS		Tahap Persiapan
PERS+ <i>n</i>	PERS. <i>N</i>	Tahap persiapan pada item pertanyaan ke- <i>n</i> .
PELA		Tahap Pelaksanaan

PELA+ n	PELA. N	Tahap Pelaksanaan pada item pertanyaan ke- n .
PENG		Tahap Pengolahan
PENG+ n	PENG. n	Tahap pengolahan pada item pertanyaan ke- n .
PENY		Tahap Penyajian
PENY+ n	PENY. n	Tahap penyajian pada item pertanyaan ke- n .
PELP		Tahap Pelaporan
PELP+ n	PELP. n	Jawaban tahap pelaporan pada item pertanyaan ke- n .
P1		Pasal 1
P n		Pasal ke- n
P n + n		Jawaban untuk Pasal n pada item pertanyaan ke- n .
KO		Aspek Komunikasi
KO+ n	KO. n	Jawaban untuk aspek komunikasi pada item pertanyaan ke- n .
SU		Aspek Sumber-sumber
SU+ n	SU. n	Jawaban untuk aspek sumber-sumber pada item pertanyaan ke- n .
KE		Aspek Kecenderungan
KE+ n	KU. n	Jawaban untuk aspek kecenderungan pada item pertanyaan ke- n .
ST		Aspek Struktur Birokrasi
ST+ n	ST. n	Jawaban untuk aspek struktur birokrasi pada item pertanyaan ke- n .

Sumber: Olahan Peneliti (2018)

4. Mengklarifikasikan data dengan pernyataan penting dan mengelompokkan data kedalam unit tema yang berhubungan dengan fokus penelitian.
5. Menafsirkan data yang dilakukan dengan mengembangkan deskripsi tekstural mengenai apa yang terjadi, deskripsi struktural mengenai bagaimana hal itu terjadi, dan mengembangkan esensi.
6. Setelah data ditafsirkan, akan disajikan dan divisualisasi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, gambar, atau pembahasan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Gambaran Umum Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Probolinggo atau yang dikenal dengan sebutan DISPENDA yang kini berganti nama serta bergabung dengan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah organisasi yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten Probolinggo memiliki tanggung jawab dalam pemungutan pendapatan daerah melalui peng-koordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya. Dinas Pendapatan Dearah dibentuk oleh Bupati melalui peraturan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Probolinggo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, memiliki peran sesuai karakteristik yaitu lebih kepada bersifat administrasi penyusunan formulasi kebijakan, bimbingan/pembinaan dan koordinasi terkait keuangan daerah Kabupaten Probolinggo.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat pelaksanaan penelitian di lakukan. Penelitian dilakukan untuk mencari suatu jawaban dari analisis permasalahan yang di simpulkan. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan peneliti berada di Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo terletak di Jalan Suroyo no 49, Probolinggo dan Tambak Garam di Desa Sidopekso Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tanggal 12 Nopember 2007 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Probolinggo, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 23 tahun 2008 tentang uraian tugas dan fungsi dinas pendapatan Kabupaten Probolinggo, DISPENDA Kabupaten Probolinggo yang kini merubah struktur organisasi menjadi BPPKAD mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pendapatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, DISPENDA Kabupaten Probolinggo mempunyai fungsi dalam hal :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan serta pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Perumusan perencanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Perumusan perencanaan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Teguran Pajak (STP) dan sarana administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak.
- e. Perumusan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian atas pekerjaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya serta penagihan pajak bumi dan bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada daerah;
- g. Perumusan perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pendataan penetapan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah, penerimaan asli daerah.
- h. Pengelolaan administrasi umum;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo dijabarkan di bawah ini ;

1. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendaftaran dan Penetapan;
- d. Bidang Penyetoran dan Penagihan;
- e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
- f. Bidang Pengendalian Operasional.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protocol, hubungan masyarakat, pemeliharaan, penyusunan program dan perencanaan serta laporan dinas. Dalam menjalankan tugas Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan inventarisasi;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga surat menyurat dan kearsipan;
- e. Penyiapan data informasi, keputusan dan hubungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sesuai Struktur Organisasi Dispenda, Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan.
3. Bidang Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas pokok menyusun program perencanaan teknis pelaksanaan perhitungan dan penetapan jumlah pajak daerah yang terhutang, obyek dan subjek pajak, retribusi daerah dan membantu pelaksanaan pendataan obyek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak; Dalam menjalankan tugas Bidang Pendaftaran dan Penetapan mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan pendaftaran serta pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah melalui formulir pendaftaran, menghimpun dan mengolah data obyek dan subjek wajib pajak dan retribusi daerah melalui Formulir Surat pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari instansi lain;
 - b. Penyusunan daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan penetapan;
 - c. Pelaksanaan perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. Pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan;

- e. Pelaksanaan pembantuan penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), serta yang lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta mendistribusikan kepada wajib pajak dan kepala unit yang lain;
 - f. Pelaksanaan dan pengelolaan pajak-pajak perimbangan dari pusat dan daerah;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas.
4. Bidang Penyetoran dan Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan serta pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang mempunyai batas jatuh tempo, melaksanakan pelayanan keberatan, keringanan dan angsuran pajak daerah dan retribusi daerah serta melaksanakan penyetoran hasil penagihan dan hasil pemungutannya ke Badan Pengawas Keuangan Daerah (BPKD) melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP). Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penyetoran dan Penagihan mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan penagihan serta pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pelaksanaan pelayanan keberatan, keringanan serta angsuran atas penetapan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan batas kewenangannya;
 - c. pelaksanaan penyetoran hasil penagihan dan pemungutannya ke BPKD melalui BKP (Bendahara Khusus Penerima) Dinas Pendapatan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5. Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembukuan serta pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak

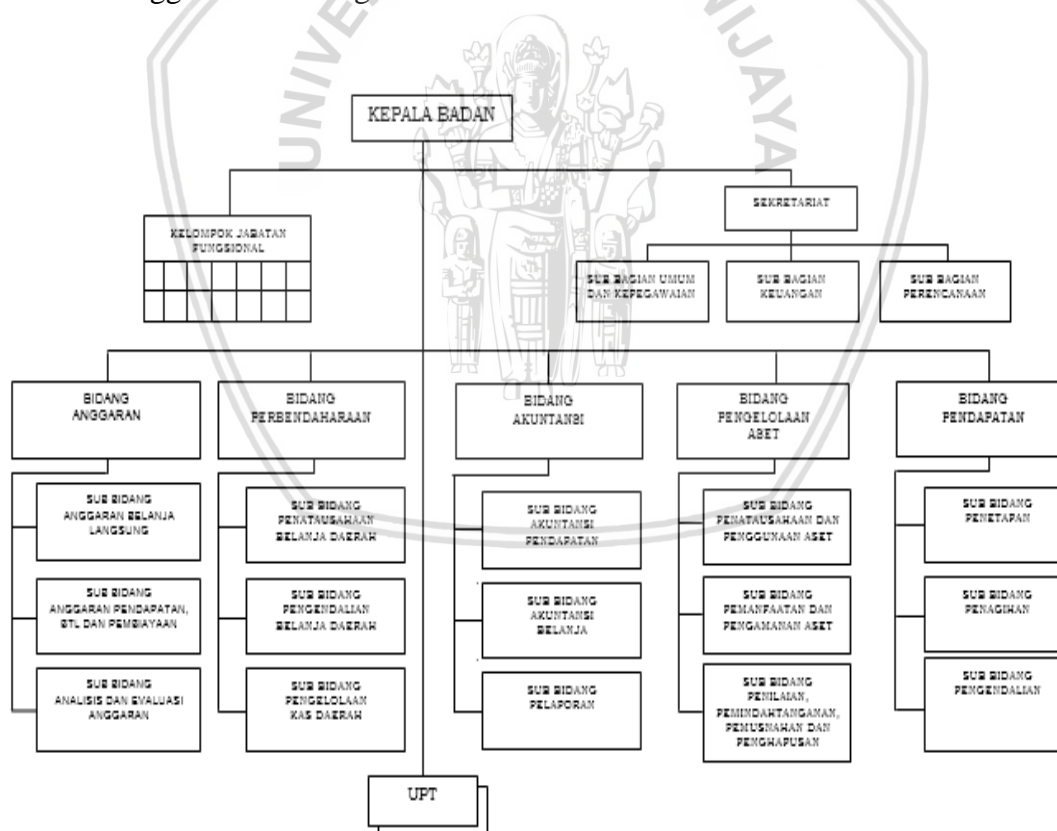
daerah, retribusi daerah serta pengelolaan benda berharga; Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Pencatatan mengenai penetapan serta penerimaan dari pemungutan atau pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah kedalam kartu jenis pajak daerah dan retribusi daerah dan kartu wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. Penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan;
 - c. Pelaporan penerimaan dan perkembangan PAD;
 - d. Pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan atau pembayaran atau penyetoran pajak dan retribusi daerah, realisasi penerimaan dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas.
6. Bidang Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pendapatan daerah dan intensifikasi serta ekstensifikasi pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya bidang pengendalian operasional mempunyai fungsi:
- a. Pembinaan teknis operasional, bimbingan serta petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;

- b. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan dan pengendalian sumber sumber pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

7. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 23 Nopember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo, maka Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :



Gambar 3.1 Struktur Organisasi

Sumber : RESNTRA 2013 – 2018

B. Gambaran umum Badan Pendapatan Pengelola Aset Keuangan Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo

Badan Pendapatan Pengelola Aset Keuangan Daerah atau yang disingkat dengan BPPKAD merupakan suatu dinas yang dimana memiliki tanggung jawab dalam pemungutan pendapatan daerah melalui peng-koordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya. Dinas ini yang dulunya bertempat di Jl. Suroyo no. 49 Probolinggo sekarang berpindah pada pemerintahan yang terpusat di Jl. Panglima Sudirman no. 134 Kraksaan. BPPKAD mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang terutama di peroleh dari hasil pajak daerah yang di atur oleh Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 11 objek pajak yang dipungut oleh daerah. Tak hanya berfokus di pendapatan yang ada, dinas ini juga bertugas menangani asset asset daerah yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah demi membangun Kabupaten Probolinggo untuk kedepannya.

C. PENYAJIAN DATA

1. Peran UMKM di Sektor Garam dalam Upaya Membantu Meningkatkan Pajak Asli Daerah Kabupaten Probolinggo

a. Penerapan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Sebagai Upaya Peningkatan PAD

Penerapan pajak Mineral bukan logam dan batuan menjadi prospek pembangunan dan pemberdayaan yang sangat bagus di Kabupaten Probolinggo. Prospek tersebut sangat bisa diandalkan dari segi pajak daerah yang dipungut.

Pemungutan tersebut bisa menambah total dari pemasukan PAD lainnya. Melihat kondisi geografis Kabupaten, Probolinggo terletak di selat Madura yang mayoritas penduduknya paling banyak berprofesi sebagai nelayan dan banyak mata pencaharian yang bersumber dari laut. Tak luput dari itu garam juga termasuk Sumber Daya Alam yang bisa di manfaatkan masyarakat sekitar pesisir untuk menambah mata pencaharian selain bertani dan melaut, dari SDA yang ada tersebut masyarakat tentunya butuh dorongan dan motivasi dari pemerintah untuk memanfaatkan SDA yang ada, supaya dampak dari SDA yang dikelola dapat menambah pendapatan daerah dan tentunya mengurangi banyaknya pengangguran yang ada di wilayah tersebut. Melihat hal tersebut, pemerintah juga harus tanggap dalam membantu memfasilitasi masyarakat yang termasuk dalam fokus pemerintah dalam pembangunan daerah. Mengenai fokus kabupaten Probolinggo dalam pembangunan daerah, Bapak Arif selaku sub bidang penagihan pada BPPKAD Kabupaten Probolinggo mengatakan bahwa:

“Tahun ini, karena instruksi dari presiden harus berinfrastruktur semua yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, jalan, jembatan, sekolah, kesehatan. Kalau tidak anggaran kita yang dikurangi. Itu kan ada sanksinya. Makanya ada pembangunan bertahap”. (DP1 RM1 A1)

Hal tersebut menjelaskan bahwa fokus Kabupaten Probolinggo dalam pembangunan daerah tertuju pada pembangunan infrastruktur yang digunakan oleh masyarakat umum yang berguna bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat Kabupaten Probolinggo. Senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Arif,

Menurut Bapak Susilo selaku kepala bidang pendapatan di BPPKAD Kabupaten

Probolinggo fokus Kabupaten Probolinggo dalam pembangunan daerah yaitu:

“berbicara tentang Kabupaten Probolinggo berarti lingkup kecil ya mas, untuk fokusnya sendiri ada di visi misi bupati terpilih yaitu optimalisasi pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. pada tahun 2018 ini di khususkan di sektor pariwisata dulu mas. Untuk tahun 2017 pada sektor pendidikan. Intinya kita tetap fokus pada pengembangan pelayanan masyarakat” (DP2 RM1 A1)

Berdasarkan keterangan kedua narasumber diatas fokus Kabupaten Probolinggo dalam pembangunan daerah yaitu memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur yang dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat terkait pengembangan UMKM guna membantu pembangunan daerah.

Penerapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan PAD. Tujuan pemerintah dalam pengembangan UMKM dibutuhkan langkah awal pemerintah untuk menjadikan fokus dalam memberikan kontribusi bagi UMKM. Menurut Bapak Arif selaku sub bidang penagihan pada BPPKAD Kabupaten Probolinggo, tujuan pemerintah dalam pembangunan UMKM yaitu:

“Tujuan dari pemeritah yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Memanfaatkan SDA yang ada juga kita fokuskan agar berguna bagi masyarakat kita, kan itu juga bisa untuk membantu pendapatan asli daerah. karna kita kan kawasan pesisir. Ini kawasan yang potensial sekali, tapi kita apakah didukung. Yang ada sekarang kan di kikis, berubah lahan. Abrasi, disewakan, entah itu dijual. Karena sekmen

pasarnya para petani garam itu tidak ada. sudah menjual kesana tidak boleh, kesana mahal, akhirnya kan rugi. Untuk menutupi kerugian akhirnya dijual. Untuk potensinya kita luar biasa, buktinya kita surplus, ditanyakan pada saat itu kita surplus, cuma tidak bisa menjual kemana mana. Malah menurut kesehatan garam Probolinggo itu termasuk cukup baik. Ada kadar sekitar 60% lah, valid nya di perikanan. Dari kenyataan yang ada di lapangan itulah kita berusaha membantu memfasilitasi para petani garam untuk bisa menikmati hasil dari pemanfaatan sumber daya alam milik kita sendiri ini.” (DP1 RM1 A2)

Berdasarkan penjelasan tersebut secara jelas bahwa pemerintah juga mengusahakan fasilitas yang seharusnya di dapatkan oleh para petani garam. Sejalan dengan pendapat bapak Arif, menurut Bapak Susilo selaku kepala bidang Pendapatan di BPPKAD Kabupaten Probolinggo terkait tujuan pemerintah dalam pengembangan UMKM yaitu:

“tujuan pemerintah seperti yang kita ketahui bersama selalu ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Tidak hanya semata-mata untuk memajukan Kabupaten Probolinggo saja, namun juga dengan memberikan fasilitas dan kemudahan bagi para petani garam ya disini khususnya.” (DP2 RM1 A2)

Dari penjelasan kedua narasumber diatas dapat kita lihat upaya yang dilakukan pemerintah tidak semata-mata dilakukan untuk memajukan Kabupaten Probolinggo saja, namun juga untuk membangun kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo.

Memajukan suatu daerah tentunya tidak mudah, banyak upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan dan target yang di capai. Salah satu usaha tersebut yaitu dengan mengembangkan UMKM. Namun disisi lain tidak dapat dipungkiri akan selalu adanya kendala-kendala yang menjadi batu sandungan bagi pemerintah dalam merealisasikan rencana pembangunan daerah.

Berikut pendapat Bapak Arif selaku sub bidang Penagihan di BPPKAD

Kabupaten Probolinggo yaitu:

“Sebenarnya untuk kendala kita punya pada SDM nya mas, karena tidak semua orang bisa kita ajak untuk berpikir terbuka dalam hal ini saya berbicara legalitas usahanya agar kenapa maksud saya supaya usaha mereka bisa dikembangkan hingga keluar Probolinggo dengan perijinan dan proses yang mudah. Saya rasa kendala kita saat ini terletak disitu sih mas.” (DP1 RM1 A3)

Pemahaman seseorang atas sesuatu pasti berbeda-beda, inilah yang dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya seseorang menerima dan menjalankan informasi yang di dapatkan dengan baik. Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor utama penggerak suatu rencana untuk mencapai kesuksesan dari tujuan yang diinginkan. Melengkapi pendapat dari Bapak Arif, Bapak Susilo selaku kepala bidang Pendapatan di BPPKAD Kabupaten Probolinggo berpendapat bahwa:

“Mungkin ada beberapa kendala yang kami hadapi seperti tidak patuhnya pemilik UMKM atau lahan yang di jadikan tempat pembuatan garam tidak membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, terus masyarakat yang kurang memahami tentang pengarahan dari kami dalam sosialisai tentang pengembangan UMKM tersebut. Komponen terpenting sebenarnya ada pada SDM nya sebagai media penggeraknya. Maka dari itu kita selalu memberikan penyuluhan kepada para pelaku UMKM memberikan pengarahan-pengarahan agar usaha ereka lebih terarah”(DP2 RM1 A3)

Menurut kedua narasumber diatas jelas mengatakan bahwa sebenarnya kendala utama berada pada SDM, setiap orang memiliki cara pikir dan cara pandang yang berbeda. Dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi

pemerintah Kabupaten Probolinggo berharap dapat selalu memperbaiki kinerja pelaku UMKM.

b. Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Probolinggo dari Segi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Khususnya di Sektor Garam

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk di manfaatkan. Pemanfaatan sumber daya alam ini berpengaruh untuk dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah. Peningkatan kualitas garam dan kelayakan pun menjadi fokus utama pemerintah agar garam dapat di konsumsi dengan baik. Bapak Arif selaku sub bidang penagihan di BPPKAD Kabupaten Probolinggo menjelaskan bahwa :

“Sempat dikumpulkan oleh kapolres, teman teman di petani garam itu surplus, khusus kab prob itu surplus. Cuma mereka tidak bisa mengedarkan garam mereka karna keterkaitan dengan BPOM yang sangat mahal. Biaya di BPOM per perusahaan sekitar 60jt. Mereka para umkm tidak mampu. Makanya kita kasi solusi dari beberapa umkm garam tersebut agar membentuk paguyuban dan menjadi satu untuk urunan atau bagaimana agar bisa mendaftar pada BPOM dan mencari legalitas BPOM, ego nya di turunkan biar bisa bergabung. Kalau ukm surplus itu mengirim menyuplai ke daerah tinggi sekitar Kabupaten Probolinggo, karena banyak permintaan garam grosok, secara tidak langsung mereka menyebutkan bahwa mereka menjual untuk dikonsumsi orang atas. Tapi pertanyaannya layakkah garam tersebut di konsumsi? Makanya ada saber garam. Mereka kan mengabaikan kesehatan masyarakat. Lebelnya yg ada itu dari dinas perikanan. Pada saat saya disitu harus ada aturan dari BPOM. Saran dari kapolres itu harus ada BPOM, kalo tidak ada BPOM kita tangkap. Bolehlah dijual kepada perusahaan yang ada BPOM nya, seperti di pasuruan, banyuwangi. Tapi kan mereka punya perusahaan sendiri. Itu menjadi kendala, akhirnya kita rugi. Ayo kita tuntun untuk menjadi satu menjadi perusahaan biar bisa mendapat legalitas BPOM.” (DP1 RM1 A4)

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Arif diatas yang memberatkan bagi para pelaku UMKM khususnya petani garam adalah legalitas BPOM nya karena tarif yang dikenakan terlalu mahal dan susah untuk dijangkau oleh pelaku usaha kecil. Bapak Susilo selaku kepala bidang pendapatan di BPPKAD Kabupaten Probolinggo melengkapi pendapat yang di berikan oleh Bapak Arif selaku sub bidang Penagihan pada BPPKAD Kabupaten Probolinggo, beliau menjelaskan bahwa:

“Ada mas, itu masuk dalam optimalisasi sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Probolinggo. Kemudian adanya bantuan dan sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki unit usaha di sektor garam maupun sektor lain. Di sisi lain kalau untuk petani garam umkm garam itu kita juga membantu dalam bentuk memfasilitasi seperti alat yang diberikan dari dinas perikanan berupa bilma, terpal, dll” (DP1 RM1 A5)

Kedua pernyataan narasumber diatas dapat dilihat bahwa pemerintah bersedia memfasilitasi para pelaku UMKM untuk menjalankan usahanya semaksimal mungkin. Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus menggenjot perkembangan UMKM guna membantu meningkatkan pendapatan daerah. Dengan berbagai upaya pemerintah membuat inovai untuk dapat mengembangkan UMKM. Menurut Bapak Arif selaku sub bidang Penagihan di BPPKAD Kabupaten Probolinggo terkait upaya pemerintah dalam pengembangan UMKM yaitu:

“Pemerintah dengan rutin memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang terdaftar dalam pengusaha UMKM untuk terus meningkatkan usaha yang sedang dijalankan. Kemudian mendata bagaimana pemodalan, lalu kendala apa saja yang dialami, setelah semua keluhan kita tangani maka kita pun

meminta balasan setimpal dengan meminta mereka untuk memaksimalkan pendapatan yang dihasilkan dari usahanya” (DP1 RM1 A6)

Penjelasan Bapak Arif memaparkan bahwa pemerintah selalu mendukung pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya karena UMKM lebih memberikan kontribusi yang membantu bagi masyarakat jika dibandingkan dengan Usaha Besar Menengah (UBM). Berikut menurut Bapak Susilo selaku kepala bidang Pendapatan di BPPKAD Kabupaten Probolinggo:

“Pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan dukungan bagi pengembangan UMKM, berupa sosialisasi langsung dan bantuan bagi UMKM yang mengajukan permohonan kepada kami agar mendapat modal untuk memajukan usaha yang telah di bangun oleh masyarakat sekitar, contohnya seperti UMKM garam mas yang mas teliti” (DP2 RM1 A5)

Senada dengan yang di sampaikan oleh bapak Arif dan pak Susilo pun di perkuat dengan data tabel yang memuat jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar Menengah (UBM dimana jumlah UMKM lebih jauh pelaku usahanya di banding UBM. Berikut peneliti sajikan data yang menunjukkan bahwa UMKM lebih mendominasi perusahaan sensus ekonomi di Kabupten Probolinggo.

2. Pengembangan UMKM di Sektor Garam berdasarkan Pembangunan Daerah di Kabupaten Probolinggo

Kabupaten Probolinggo merupakan suatu Kabupaten yang mulai berkembang dalam segi pembangunan infrastruktur. Pembangunan tersebut bisa dicapai melalui hasil dari pendapatan daerah yang dominan diperoleh dari sektor

pajak. Penerapan pajak daerah menjadi langkah awal pemerintah Kabupaten untuk fokus dalam pembangunan daerah melalui pendapatan yang dihasilkan oleh pajak. Oleh sebab itu diadakannya desentralisasi sebagai alat untuk menyerahkan wewenang pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan daerahnya. Untuk mengatur pengeluaran dan pemasukan anggaran biaya yang dimiliki suatu daerah maka harus ditetapkan peraturan-peraturan yang mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi yang ditentukan oleh daerah agar terciptanya pelayanan yang transparansi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang notabene di hasilkan dari sektor pajak harusnya mampu menjadi modal suatu daerah dalam mengembangkan potensi daerah yang ada. Pajak itu sendiri diharapkan mampu menambah hasil pendapatan suatu daerah yang dimana potensi dari pajak tersebut harus mampu dimaksimalkan. Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 ada beberapa objek pajak yang dipungut oleh daerah salah satunya adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini diharapkan mampu menambah pendapatan daerah sebagai upaya pengembangan daerah dan mensejahterakan masyarakat.

Sektor pajak daerah mencapai Rp 11,88 milyar dari target Rp 40.38 milyar; Untuk retribusi daerah mencapai lebih Rp 7,09 milyar dari target Rp 23,90 milyar; Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melebihi target sebesar Rp 5,56 milyar dari target sebelumnya Rp 5,49 milyar. Sementara untuk sektor lain-lain PAD yang sah perolehannya mencapai Rp 35,30 milyar dari target sebesar Rp

149,90 milyar. “Dengan capaian ini Kabupaten Probolinggo bisa dibilang kurang dalam target pajak daerah yang di realisasikan.

Begitu besar potensi Pajak di Kabupaten Probolinggo khususnya di Oajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang layak untuk dikembangkan demi menambah pendapatan daerah. Garam yang menjadi salah satu SDA yang mulai berkembang di Kabupaten Probolinggo menjadi alternatif lain dalam segi peningkatan PAD. Menurut apa yang dikatakan Pak Susilo selaku kepala bidang pendaptan di BPPKAD Kabupaten Probolinggo:

“Karena daerah Kabupaten Probolinggo ini merupakan daerah pesisir dimana kita dapat memaksimalkan sumber daya alam yang telah dilimpahkan di daerah kita. Setau saya UMKM garam itu juga cukup luas cakupan pendistribusiannya, tidak hanya di sekitar Probolinggo saja bahkan jember, lumajang, pasuruan juga mengambil di Kabupaten Probolinggo. Jadi tidak ada salahnya pemerintah memberikan dukungan penuh pada petani garam untuk mengembangkan usahanya, bahkan bisa dibuatkan legalitas untuk pendistribusian di daerah Probolinggo sendiri” (DP2 RM2 A6)

Pendistribusian garam di Kabupaten Probolinggo cukup luas hingga keluar wilayah Kabupaten, hal tersebut bisa menjadi pertimbangan pemerintah dalam mendorong UMKM sektor garam dalam perindustriannya sehingga berdampak bagi pendapatan daerah di Kabupaten Probolinggo. Senada dengan apa yang dikatakan pak susilo, menurut pak arif selaku sub bidang Penagihan di BPPKAD Kabupaten Probolinggo:

“Kalau UKM surplus itu mengirim menyuplai ke daerah tinggi sekitar Kabupaten Probolinggo, karena banyak permintaan garam grosok, secara tidak langsung mereka menyebutkan bahwa mereka menjual untuk

dikonsumsi orang atas. Tapi pertanyaannya layakkah garam tersebut di konsumsi? Makanya ada saber garam. Mereka kan mengabaikan kesehatan masyarakat. Lebelnya yg ada itu dari dinas perikanan. Pada saat saya disitu harus ada aturan dari BPOM. Saran dari kapolres itu harus ada BPOM, kalo tidak ada BPOM kita tangkap. Bolehlah dijual kepada perusahaan yang ada BPOM nya, seperti di pasuruan, banyuwangi. Tapi kan mereka punya perusahaan sendiri. Itu menjadi kendala, akhirnya kita rugi. Ayo kita tuntun untuk menjadi satu menjadi perusahaan biar bisa mendapat legalitas BPOM.” (DP1 RM2 A6)

Kebutuhan garam di lingkup wilayah Kabupaten Probolinggo juga cukup besar, adanya wilayah pegunungan yang dimana membutuhkan pasokan garam di sekitar pesisir di Kabupaten Probolinggo untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari, entah untuk dikonsumsi maupun untuk diolah sebagai bahan pupuk maupun peternakan. Hal itu membutuhkan legalitas dari BPOM agar lebih berkembang dan bisa menjadi kebutuhan rumah tangga dan bahan konsumsi pribadi.

Terkait dengan perindustrian garam yang ada di Kabupaten Probolinggo dengan adanya beberapa UMKM garam maupun perseorangan yang di kelola di wilayah Kecamatan Kraksaan juga berdampak bagi petani garam yang ada. Cakupan wilayah di sekitar Kabupaten dan luar Kabupaten Probolinggo yang menyuplai garam di Kecamatan Kraksaan. Oleh karena itu UMKM dari sektor garam ini patut di pertimbangkan sebagai upaya meningkatkan PAD.

Proses pembuatan garam di Kecamatan Kraksaan tidaklah susah dan hanya memakan sedikit waktu dan modal usaha yang cukup kecil untuk memproduksi garam mentah yang diperoleh dari air laut yang sudah ada sebagai SDA yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Biaya operasional yang dikeluarkan oleh suatu UMKM maupun perorangan dalam membuat garam tidak memakan biaya yang

begitu besar dan lamanya proses pembuatan yang tidak memakan waktu banyak menjadikan garam cukup efektif dalam menjadikan peluang bisnis yang ada. Namun dari mudahnya proses pembuatan garam, tetap masih ada kendala dalam pembuatannya. Kendala tersebut tak luput dari cuaca yang tak menentu. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan harga jual garam dipasaran ikut berpengaruh apabila cuaca tidak menentu. Tidak menutup kemungkinan para petani garam yang ada juga mengalami penurunan pendapatan karena faktor cuaca yang tidak menentu tersebut.

Peneliti berupaya mencari tahu hasil pendapatan dari usaha tambak garam yang ada tersebut sebagai tolak ukur pendapatan yang diperoleh dari UMKM garam tersebut apakah ada jumlah total yang ditetapkan menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Adanya aktifitas pembuatan garam di tambak garam yang ada di Kecamatan Kraksaan bisa dimiliki oleh perseorangan yang harusnya memenuhi kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hal tersebut tidak menutup pemerintah dalam mengembangkan UMKM yang ada tersebut. Dijelaskan oleh pak Arif selaku kepala seksi di bidang pendapatan BPPKAD dalam upaya membangun UMKM di Kabupaten Probolinggo:

“Dalam langkah untuk membangun UMKM kita sebagai fasilitator pasti berupaya secara maksimal untuk membantu UMKM yang mengajukan permintaan bantuan midal maupun lahan yang dibutuhkan. Tak luput dari itu kita juga mengawasi kinerja UMKM tersebut apakah ada dampak bagi daerah sekitar maupun pendapatan asli daerah khususnya, toh kita nggak membantu semua UMKM. Kita juga harus mempertimbangkan UMKM apa saja yang lebih membutuhkan bantuan pemerintah” (DP1 RM2 A7)

Keterangan yang dijelaskan oleh pak arif selaku kasi di bidang pendapatan tersebut, pemerintah turut berkontribusi dalam membantu dan membangun UMKM sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah. Begitupula seperti apa yang dikatakan oleh pak Susilo selaku kapid pendapatan di BPPKAD:

“UMKM sendiri selain berperan dalam penghasilan daerah di dalam sektor pajak juga berperan dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. UMKM juga sangat berperan dalam mengatasi pengangguran” (DP2 RM2 A7)

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti di temukan bahwa kontribusi UMKM tidak hanya dalam meningkatkan pendapatan daerah yang dihasilkan dari pajak, namun UMKM juga berkontribusi besar dalam mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Probolinggo.

3. Upaya Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Probolinggo

Pendapatan Asli Daerah yang dipungut oleh pemerintah umumnya yang bersumber dari hasil pajak diharapkan mampu membangun dan mengembangkan daerahnya serta bersaing dengan daerah lain untuk kesejahteraan daerahnya sendiri. Adanya SDA di suatu daerah diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal agar berdampak pada pendapatan daerah yang dimana pemerintah bisa memungut pajak dari potensi yang ada tersebut apabila terjadi suatu eksploitasi SDA secara illegal. Pemanfaatan SDA yang dilakukakn oleh suatu unit usaha dalam skala kecil maupun besar ataupun dimanfaatkan sebagai konsumsi pribadi diharapkan mampu berdampak bagi pendapatan yang diperoleh dari daerah, maka dari itu diperlukan aturan aturan

tertentu mengenai SDA yang dikelola tersebut oleh pemerintah daerah supaya pemerintah juga bisa turun tangan dalam mengembangkan potensi daerah yang ada dan membantu dalam segi pengelolaan yang dilakukan.

Pemerintah diharapkan mampu menggali potensi daerah yang ada sebagai upaya peningkatan pendapatan yang ada sebelumnya. Dari hasil wawancara yang di peroleh dari bapak Suslo selaku kepala bidang Pendapatan di BPPKAD Kabupaten Probolinggo mengatakan bahwa:

“Kita melakukan penyuluhan terhadap wilayah-wilayah dimana ada suatu potensi yang berdampak pada perkembangan daerah dalam segi ekonomi. Kita mendukung UMKM yang memiliki legalitas perijinan usaha secara maksimal sehingga kami mengharapkan pengusaha UMKM pun memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada sehingga bisa membantu meningkatkan PAD “ (DP2 RM3 A11)

Dari pernyataan tersebut pemerintah turut mendorong adanya pengelolaan yang dilakukan oleh UMKM terhadap SDA yang ada dengan cara penyuluhan ke setiap daerah yang dilihat mempunyai SDA cukup baik untuk dikelola oleh masyarakat sekitar. Dari beberapa SDA yang ada, pemerintah diharapkan mampu mengembangkan potensi tersebut sebagai upaya peningkatan PAD, sebagaimana yang dikatakan oleh pak Arif selaku sub bidang Penagihan di BPPKAD Kabupaten Probolinggo:

“Kalau SDA itu kan sudah diberikan dari yang maha kuasa. Kita kan sekarang harus dituntut berinovasi, entah itu dari brandingnya, entah dari segi pengolahannya. Dari apa saja yang bisa kita untuk mengeksploitasi kegiatan minerba yang ada di kab prob. Karena itu memang arahan dari atasan. Dari kegiatan seperti itu timbul adanya retribusi dan pajak, jelas ekonomi disitu jalan. Dari itu kita bisa ambil dari pajak dan retribusi. Misal ada UMKM yang promosi, ada pajak reklamenya. Tinggal mereka sendiri yang memaksimalkan, kita Cuma memfasilitasi. Kebetulan kalo itu fokusnya itu

ada di dinas koperasi. Kalau masalah peralatan untuk meningkatkan daya saing itu ada di disperindag. Karena kita sudah bagi tugas mas” (DP1 RM3 A11)

Perlunya peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Probolinggo sebagai upaya mensejahterkan masyarakat di lingkup wilayah yang mempunyai potensi daerah yang cukup bagus untuk dikelola diharapkan mampu membantu mengurangi tingkat pengangguran di suatu daerah. Hal tersebut juga pernah di jelaskan oleh pak Susilo selaku kepala bidang pendapatan di BPPKAD Kabupaten Probolinggo mengatakan bahwa:

“Peningkatan potensi daerah di kabupaten provinsi probolinggo itu cukup banyak bukan hanya di bidang UMKM saja, tahun 2017 kemaren potensi di kabupaten probolinggo itu di fokuskan di sektor pariwisata sudah ada sekitar 4 objek wisata di kabupaten probolinggo yang dibuka untuk umum dan bisa dinikmati dengan cara membayar retribusi ke tempat wisata tersebut untuk meningkatkan anu apa penghasilan masyarakat sekitar yang berperan penting untuk mengelolah wisata tersebut, juga adanya pengawasan pemerintah” (DP2 RM3 A12)

Hampir sama dengan yang dikatakan oleh pak susilo, pak arif selaku sub bidang penagihan di BPPKAD Kabupaten Probolinggo juga mengatakan:

“Peningkatan potensi di kabupaten probolinggo ini bisa dibilang cukup baik mas, Karena banyak potensi dari sektor penerimaan pajak yang mulai di kelola oleh pemerintah, contohnya yang paling banyak itu di sektor pariwisatanya mas soalnya pada tahun kemaren itu fokus kabupaten ini ke sektor pariwisata” (DP1 RM3 A12)

Dari penjelasan yang ada tersebut dikatakan bahwa peningkatan yang ada di Kabupaten Probolinggo terbilang cukup baik, bukan hanya dalam segi UMKM nya, dari sektor pariwisata yang menjadi fokus kabupaten dalam menggali potensi yang

ada pada tahun 2017 sudah ada 4 tempat wisata baru yang telah di buka dan di kelola oleh masyarakat sekitar serta tetap dalam pengawasan pemerintah.

Dari adanya potensi daerah di Kabupaten Probolinggo di tiap tiap daerah tentu ada ketimpangan ekonomi yang terjadi dalam menggali potensi tersebut. Diharapkan pemerintah mampu menanggulangi ketimpangan yang terjadi tersebut, agar tiap daerah mampu berkembang dengan adanya potensi SDA yang ada. Menurut pak Susilo selaku kepala bidang pendapatan di BPPKAD Kabupaten Probolinggo mengatakan bahwa:

“Upaya kami dalam mengatasi ketimpangan potensi yang ada di kabupaten probolinggo ini tergantung pada potensi yang ada di daerah masing-masing gitu loh, toh potensi daerah dalam penghasilan pendapatan daerah itu tidak sama kalau dijelasin panjang, ini dilihat dari potensi daerah masing-masing.”(DP2 RM3 A13)

Dalam upaya mengatasi ketimpangan tersebut tentunya perlu adanya kesadaran diri dari masyarakat juga. Tidak semuanya pemerintah mampu mengatasi permasalahan yang ada di tiap tiap daerah di Kabupaten Probolinggo, hal tersebut juga dijelaskan oleh pak Arif selaku sub bidang Penagihan di BPPKAD Kabupaten Probolinggo:

“Pertama jelas dari kesadaran masyarakat mas, atas apa yang dia lakukan akan timbul efek seperti pajak dan retribusi. Kesadaran mereka itu kurang. Terjadi pada PBB. Mereka tidak akan bayar kalau tidak di tagih, dan mereka itu karepe dewe, nah itu dari segi SDM. Kalau tmene temen itu Cuma banyak menunggu, menunggu dari hasil orang lain itu beraktifitas. Intinya tidak melihat, bahkan ada investor luar yang masuk, setelah ada investor luar yang masuk mereka kebingungan. Karna itu, efek dari situ kan masyarakat hidup, ekonomi masyarakat sedikit berkembang. SDM tidak kuat mas, negara untuk membiayai seperti itu ndak sanggup. Merka harus berkreasi sendiri, kami hanya memfalisitasi. Itupun sebisa yang kami mampu, tidak semuanya kita bantu. Tergantung skala prioritas, apakah ini menjadi prioritas apa tidak.

Makanya sekarang kita selaku fasilitator menyiapkan bagaimana ekonomi disuatu tempat bisa hidup dalam rana hukum. Bukan semaunya sendiri, kadang mereka maunya sendiri, tidak sesuai SOP yang ada. Air lautnya punya provinsi, pantainya punya kia, akhirnya kita bekerja keras untuk mengeluarkan ijin untuk aktifitas yang ada itu. Istilahnya biarkan mereka bekerja tapi tidak mengenyampingkan hak dan kewajibannya membayar pajak. Ada pajak hiburan, parkir dll. Seperti minerba itu kita mau masuk, tapi kita ndak bisa, karna hak dari propinsi. Ada bagi hasil dari propinsi dan daerah. Memang betul propinsi dan pusat itu mengambil wewenang dari kegiatan kegiatan tersebut. Takutnya lambat laun kabupaten dan kota itu maunya sendiri. Seperti air bawah tanah dulunya di kelolah dari kabupaten. Karena ini hasil bumi maka diambil oleh propinsi, kenapa? Biar kordinasi antar kota kabupaten itu enak, buktinya ranu di lumajang itu kan besar sumbernya. Itu kan harusnya mengalir sekelilingnya, termasuk probolinggo. Itu di stop mas, karena tidak adanya MOU. Akhirnya kita membuat perjanjian. Nah dari kejadian tersebut maka diambil jalur tengahnya maka diambil propinsi saja, biar kordinasinya enak. Akhirnya ada tolak usul apa saja yg bisa diambil propinsi dana pa saja yang diambil daerah. Seperti itu” (DP1 RM3 A13)

Data tersebut menjelaskan bahwa upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Probolinggo harus ada kesadaran diri dari masyarakatnya. Hal tersebut tentu berdampak besar apabila masyarakat sekitar Kabupaten Probolinggo turut aktif membantu pemerintah dengan cara taat bayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah. Tak luput dari itu adanya ketimpangan ekonomi di setiap daerah juga berdampak pada potensi daerah yang belum di gali lebih dalam oleh pemerintah setempat yang bisa menopang ekonomi masyarakat setempat.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Peran UMKM di Sektor Garam dalam Upaya Membantu Meningkatkan PAD Kabupaten Probolinggo

a. Penerapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Upaya Peningkatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan salah satu indikator yang terdapat dalam pendapatan asli daerah. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Pemberian otonomi oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Kabupaten Probolinggo yang terletak pada selat madura dimana mayoritas penduduknya bermata pencaharian yang bersumber dari laut. Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu daerah penghasil garam dengan kandungan yang baik. Selain itu masyarakat yang berprofesi sebagai petani garam pun memanfaatkan sumber daya alam yang berada di daerahnya. Fokus pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam pembangunan daerah yaitu memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur yang dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat terkait pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) guna membantu pembangunan daerah. Hal

tersebut sesuai dengan konsep desentralisasi fiskal (Mardiasmo, 2002) dimana secara teoritis ada 2 manfaat yang dapat diharapkan dari desentralisasi fiskal, dan salah satunya yaitu mendorong partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat di dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah.

Tujuan pemerintah dalam pembangunan UMKM Kabupaten Probolinggo semata-mata dilakukan untuk menciptakan keseimbangan antara kemajuan daerah dan membangun kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo. Kemajuan suatu daerah yang di maksud disini adalah dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal tersebut sesuai dengan salah satu tujuan kebijakan desentralisasi (Supamoko, 2000) yaitu (1) mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah dan (2) yaitu peningkatan pendapatan asli daerah dan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat.

Dalam kegiatan UKM atau UMKM di bidang perdagangan adalah pengusaha yang melakukan usahanya dengan cara berdagang pengusaha yang menjual komoditas yang dimiliki atau didapatkannya dengan tanpa melakukan proses terhadap komoditas tersebut. Pemerintah selalu mendukung UMKM dengan berupaya memberikan inovasi ataupun pengarahan. Namun setiap inovasi pasti memiliki kendala-kendala, dalam hal ini kendala yang di hadapi oleh pemerintah yang paling utama yaitu daya pikir sumber daya manusia (SDM). Pun kendala yang ada di Kabupaten Probolinggo kendala utama berada pada SDM, setiap orang

memiliki cara pikir dan cara pandang yang berbeda. Dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi pemerintah Kabupaten Probolinggo berharap dapat selalu memperbaiki kinerja pelaku UMKM. Hal tersebut sejalan dengan salah satu tujuan kebijakan desentralisasi (Suparmoko, 2000) yaitu mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah. Pada dasarnya pemerintah selalu mendukung semua kegiatan yang dapat memberikan kontribusi bagi daerahnya baik secara langsung maupun tidak.

b. Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Probolinggo Dari Segi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Khususnya di Sektor Garam

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang terbesar dalam rangka pembiayaan pembangunan yang mandiri. Pemerintah daerah perlu untuk lebih meningkatkan secara maksimal potensi yang ada pada pajak daerah sesuai dengan kondisi daerahnya. Pemerintah daerah harus mengetahui kondisi dan potensi daerahnya dalam pemenuhan pembiayaan pembangunan di daerah. Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Jawa Timur dimana memiliki banyak potensi yang dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan sumber penerimaan daerah, contohnya daerah-daerah penghasil garam.

Undang-Undang PDRD Tahun 2009 mengatur bahwa pajak provinsi terdiri atas lima jenis pajak. Sedangkan pajak untuk kabupaten/kota ada sebelas jenis. Undang-undang ini menutup kemungkinan bagi daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menarik pajak lain selain yang tercantum dalam

undang-undang ini (*closed list*). Menurut hasil penelitian yang dilakukan peneliti di BPPKAD Kabupaten Probolinggo, Pajak yang seharusnya dipungut oleh Pemerintah Kabupaten ada campur tangan Pemerintah pusat, yang dimana menurut informan yang di wawancarai Kabupaten Probolinggo tidak maksimal dalam memungut pajak mineral bukan logam dan batuan. Melainkan pusat yang memungut pajak tersebut kemudian di bagi kepada Kabupaten atas wilayah yang telah dikenakan pajak.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo bersedia memfasilitasi para pelaku UMKM garam dalam pengembangannya apabila ada legalitas dari BPOM atas pendistribusian garam tersebut tentunya dengan kualifikasi tertentu dan dengan persetujuan pemerintah pusat. Hal tersebut agar tidak terjadi ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah apabila pajak mineral bukan logam dan batuan ini memang benar tidak dipungut langsung oleh pemerintah daerah. Itu termasuk dalam sasaran desentralisasi fiskal (Simanjutak, 2002) yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

2. Pengembangan UMKM di Sektor Garam berdasarkan dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Probolinggo

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan

pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Iman dan Adi, 2009). Menurut pengertian tersebut Kabupaten Probolinggo yang terletak di wilayah selat Madura yang kebanyakan masyarakatnya tinggal di sekitar wilayah pesisir, yang dimana ada segelintir kelompok usaha yang memanfaatkan SDA air laut yang dikelola untuk menjadi garam. Tentunya hal tersebut masuk dalam usaha kecil yang mampu menambah hasil pendapatan masyarakat sekitar pesisir. Hal tersebut bisa menjadi sorotan pemerintah untuk mengembangkan potensi daerah agar bisa mengurangi tingkat pengangguran yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Probolinggo dan berdampak pada pendapatan daerah. Tentunya dengan adanya bantuan dari pemerintah UMKM sektor garam tersebut mampu menjadi salah satu potensi besar Kabupaten Probolinggo untuk kedepannya.

Potensi yang dimaksud dalam UMKM sektor garam tersebut dari segi pendapatan hasil usaha yang dikenakan pajak oleh daerah yang tercantum dalam Undang Undang nomro 28 tahun 2009 dimana Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam dasar pengenaan pajaknya dikenakan dari nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan tersebut yang dikenakan tarif pajak paling tinggi sebesar 25% (pasal 60 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009) dalam jangka waktu 1 (bulan) kalender.

Menurut analisis dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh UKM atau UMKM sektor garam yang terdapat pada desa Sidopekso, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo peneliti menyimpulkan dari hasil wawancara yang telah

dilakukan dengan petani garam diketahui bahwa harga garam grosok (*halite*) dijual dengan harga kisaran Rp 2.500 sampai Rp 3.000. Dari hasil panen tiap minggu mampu mencapai 4 sampai 5 ton garam grosok yang kemudian diambil oleh tengkulak dengan kisaran harga tersebut per kilogramnya. Jika dihitung dalam sebulan petani garam bisa panen sampai 4 kali tergantung dari cuaca, karena proses pembuatan garam dari air laut menjadi garam grosok hanya sekitar seminggu (ucap petani garam, 01 November 2017 pukul 16.00 WIB).

Maka peneliti dapat menyimpulkan dari hasil data yang diperoleh tersebut melalui kalkulasi sang peneliti yang dimana harga garam grosok di kali hasil panen per bulan kemudian dikalikan per tahun yang menghasilkan omzet cukup lumayan bagi UMKM tersebut. Hasilnya adalah $\text{Rp } 3.000 \times 5.000\text{kg} = \text{Rp } 15.000.000$ dalam sekali panen yang memakan waktu 1 minggu, apabila di total sebulan $\text{Rp } 15.000.000 \times 4 = \text{Rp } 60.000.000$ kemudian dikalikan setahun $\text{Rp } 60.000.000 \times 12$ maka didapatkan hasil $\text{Rp } 720.000.000$ per tahun. Jumlah tersebut masuk dalam ketentuan Kementrian Koperasi dan UKM dari kriteria total asset dari total penjualan tahunan. Hal tersebut apabila dikenakan pajak maka akan berdampak pada pendapatan daerah Kabupaten Probolinggo. Namun kurang maksimalnya penerapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Probolinggo yang paparkan oleh Pak Arif selaku sub bidang penagihan di BPPKAD Kabupaten Probolinggo terjadi ketimpangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang dimana menurut beliau pajak tersebut dipungut oleh pemerintah pusat kemudian dibagi kepada pemerintah daerah yang tidak tahu berapa besar pembagian hasil dari

pungutan pajak yang harusnya dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009.

UKM dana atau UMKM mempunyai peran yang penting dalam pembangunan ekonomi, karena intensitas tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dan investasi yang lebih kecil, sehingga usaha mikro lebih fleksibel dalam menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Hal ini menyebabkan usaha mikro tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan eksternal, karena dapat mengurangi impor dan memiliki kandungan lokal yang tinggi. Oleh karena itu pengembangan usaha mikro dapat memberikan kontribusi pada diversifikasi ekonomi dan perubahan struktur sebagai prakondisi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. (Sutrisno dan Sri, 2006).

Berpengaruhnya UMKM dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tentu berperan penting bagi pembangunan daerah di Kabupaten Probolinggo bahwa kontribusi UMKM tidak hanya dalam meningkatkan pendapatan daerah yang dihasilkan dari pajak, namun UMKM juga berkontribusi besar dalam mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Probolinggo. Peran UMKM selama ini diakui berbagai pihak yang berpengaruh cukup besar dalam perekonomian nasional. Beberapa peran strategis UMKM menurut Bank Indonesia antara lain: jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi; menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja; memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau.

3. Upaya Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Probolinggo

Kemampuan daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat berupa Pendapatan Asli Daerah merupakan bentuk dari kemandirian keuangan suatu daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan PAD salah satunya yaitu optimalisasi penerimaan dengan meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber PAD yang ada di daerah tersebut. Pajak daerah merupakan komponen PAD yang berpotensi dalam memberikan sumbangan yang baik bagi perkembangan suatu daerah. Demikian pula bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dengan memanfaatkan SDA yang melimpah dari segi perairan di Kabupaten Probolinggo dapat membantu menyumbangkan penerimaan PAD Kabupaten Probolinggo. Sentuhan pemerintah dalam membantu masyarakat menggali potensi alam dapat dilakukan dengan turun langsung dengan melakukan penyuluhan terhadap para petani garam, nelayan, dan bentuk UMKM lainnya. Hal tersebut telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan tetap menjunjung tinggi peraturan dan legalitas perijinan usaha.

Kelegalitasan perijinan usaha tidak saja berguna bagi keberlangsungan usaha para pelaku UMKM saja, namun juga bagi pemerintah, dimana usaha yang telah didaftarkan dan memenuhi syarat untuk dapat dikenai pajak dari pendapatan usahanya maka dapat membantu PAD. Pemerintah berupaya mengembangkan potensi alam dengan mengelola hasil-hasil tambang seperti pengolahan garam grosok yang diperoleh dari para petani garam. Namun upaya pemerintah tersebut tidak akan berjalan dengan baik tanpa campur tangan para pelaku usaha dan juga masyarakat, dibutuhkan kesinkronan rencana, pelaku, dan pengaplikasian rencana.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan tugas sesuai dengan sasaran desentralisasi fiskal menurut Robert Simanjuntak (2002) di Indonesia yaitu untuk memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber-sumber keuangan daerah dengan mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah, mengurangi ketimpangan antar daerah, menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Paul P. Streeten dalam (Todaro, 1983:103) menjelaskan pembangunan haruslah diarahkan kembali sebagai suatu serangan terhadap kejahatan dunia pada sekarang ini. Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja. Pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi,

peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi. Jika diukur dari tingkat pertumbuhan secara keseluruhan, pembangunan telah mencapai sukses yang besar, akan tetapi jika ditinjau dan dikaji dari segi pekerjaan, keadilan dan penghapusan kemiskinan, maka pembangunan mengalami kegagalan walaupun sukses hanya sebagian kecil saja.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai Analisis Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Garam Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Probolinggo maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Tingginya peran pajak di daerah Kabupaten Probolinggo kurang disadari oleh pemerintah yang apabila di pungut pajak maupun retribusi atas dasar eksploitasi Sumber Daya Alam akan menambah pendapatan daerah untuk kedepannya sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Probolinggo.
2. Pendapatan Daerah yang diperoleh dari sektor pajak kurang berjalan dengan lancar dari target pajak daerah sebesar Rp. 40,38 milyar masih terealisasi sebesar Rp. 11,88 milyar di tahun 2017. Apabila Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diterapkan secara maksimal maka 25% hasil dari tarif pajak tertinggi maka dapat menambah pendapatan daerah Kabupaten Probolinggo untuk kedepannya.
3. Kurangnya kesadaran dalam membayar pajak tepat waktu oleh wajib pajak sehingga berpengaruh terhadap pendapatan yang di targetkan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo. Serta kurang maksimalnya penyuluhan

terkait pajak yang dilakukan oleh pemerintah berdampak besar bagi orang yang masih kurang kesadaran dalam membayar pajak.

B. SARAN

1) Bagi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- a. Perlunya pengawasan terhadap UMKM yang ada di Kabupaten Probolinggo yang mampu berdampak pada pendapatan daerah apabila potensi yang ada di kembangkan secara maksimal.
- b. Melakukan usaha atau membuat inovasi baru agar dapat menarik UKM atau UB serta investor dan perusahaan untuk masuk dan mengeksploitasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ada di Kabupaten Probolinggo sehingga muncul objek dan subjek pajak baru yang akan menambah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah.
- c. Peneliti juga mengharapkan pemerintah terus membantu dan mendampingi UMKM untuk memajukan usahanya

2) Bagi UMKM khususnya di sektor garam

- a. Diharapkan mampu melegalitaskan usaha garamnya agar berdampak pada kemudahan perindustrian dan kemudahan bagi pemerintah dalam mendorong usaha tersebut ke ranah lebih lanjut.
- b. Pemilik usaha diharapkan mendaftarkan izin usahanya dalam upaya untuk membantu penerimaan daerah dari sektor pajak yang dipungut dari usaha tambak garam tersebut sehingga berdampak pada pendapatan daerah di Kabupaten Probolinggo.

3) Bagi Peneliti

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu menggalih lebih dalam dan mencari fenomena-fenomena lain yang di rasa mampu membantu memajukan daerah Kabupaten Probolinggo.
- b. Menambah pengetahuan peneliti mengenai pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang ada di Kabupaten Probolinggo.

C. Keterbatasan Penelitian

Selama peneliti melakukan penelitian di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo dan beberapa tambak garam di Kecamatan Kraksaan, peneliti memiliki beberapa hambatan dalam melakukan penelitiannya yaitu penelitian ini hanya dilakukan di Desa Sidopekso Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo data dan hasil penelitian tidak bisa di generalisasikan ke wilayah lainnya. Maka dari itu diperlukan kontribusi dari peneliti selanjutnya dengan tema yang sama untuk memberikan informasi yang komprehensif mengenai fenomena UMKM garam.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Prakosa, Kesit. 2005, Pajak dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. UII. Press. Yogyakarta.
- Creswell, John W, 2015. Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Davey, K.J, 1998. Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga, diterjemahkan oleh Amanullah, Jakarta: UI Press
- Iman, Adi, 2009. Pengaruh Penyaluran Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- K.S Jomo Dan Ahmad Shamsulbahriah Ku, 2004, Teori Pembangunan Ekonomi, Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd, Terbitan Pertama Kuala Lumpur.
- Kaho, J.R, 1995. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Moeleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : P.T. Remaja Rosdakarya.
- _____. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : P.T. Remaja Rosdakarya.
- Machfud, Sidik. 2002. "Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori Dan Aplikasinya Di Indonesia)
- Mardiasmo, Prof, Dr. 2004 Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi
- Mukhlis Imam, 2010, Jurnal Peran Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.
- Ramdhana, Danu. 2012. Formulasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Dalam Pemberdayaan Pelaku UMKM. FISIP. UNAIR Surabaya
- Ruswandi Rina Rahmawati, 2009, Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap PAD di Kabupaten Sumedang, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.

Simanjuntak, Timbul H dan Muklis, Imam. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: RAS

Sutrisno dan Sri, 2006. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Yogyakarta, Andi

Sugiyono, Prof, Dr. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Tanjung, Cecilia Renata. 2015. Peran Otonomi Daerah dalam Menggerakkan Ekonomi Indonesia. Surabaya.

Tasniwati, 2010, Analisis Efektifitas Pajak Pemungutan PBB dan Tinjauan Peranan PBB Sebagai Pajak Daerah, Jurnal, Akuntansi Fakultas Ekonomi Universita Indonesia.

Tholchah Hasan, M, Dkk. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif. Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang.

Todaro, P. Michael. 1983. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga edisi Terjemahan. Ghalia Indonesia. Jakarta Timur.

Tulus, 2002. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang dan Peraturan :

Undang Undang nomor 18 tahun 2016 tentang APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro

Undang Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Internet :

_____, 2017 <http://diskopumkm.jatimprov.go.id> (diakses tanggal 1 Mei 2017 pukul 21.17 WIB)

_____, 2017 <http://kemenkeu.go.id/apbn2017>. (diakses tanggal 1 mei 2017 pukul 21.17 WIB)

_____, 2017 www.probolinggokab.go.id (diakses tanggal 1 mei 2017 pukul 21.17 WIB)

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/41219/Chapter%20II.pdf;jsessionid=2207B6A6D43DB6582E4BC668F0E14491?sequence=4>
(diakses tanggal 3 mei 2017 pukul 01.00 WIB)



Lampiran 1

Nama : Pak Arif

Jabatan : sub bidang penagihan

Tanggal : 10 Januari 2018

Jam : 10.45 WIB

Tempat : Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo

1. Apa fokus Kab. Probolinggo dalam Pembangunan Daerah?

Tahun ini.. karena instruksi presiden harus berinfrastruktur semua yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, jalan, jembatan, sekolah, kesehatan. Kalau tidak anggaran kita yang dikurangi. Itu kan ada sanksinya. Makanya ada pembangunan bertahap (DP1-RM1-A1)

2. Adakah fokus Daerah dalam pengembangan UMKM di sektor garam?

Sempat dikumpulkan oleh kapolres, teman teman di petani garam itu surplus, khusus kab prob itu surplus. Cuma mereka tidak bisa mengedarkan garam mereka karena keterkaitan dengan BPOM yang sangat mahal. Biaya di BPOM per perusahaan sekitar 60jt. Mereka para umkm tidak mampu. Makanya kita kasi solusi dari beberapa umkm garam tersebut agar membentuk paguyuban dan menjadi satu untuk urunan atau bagaimana agar bisa mendaftar pada BPOM dan mencari legalitas BPOM, ego nya di turunkan biar bisa bergabung.

Kalau ukm surplus itu mengirim menyuplai ke daerah tinggi sekitar kabupaten probolinggo, karena banyak permintaan garam grosok, secara tidak langsung mereka menyebutkan bahwa mereka menjual untuk dikonsumsi orang atas. Tapi pertanyaannya layakkah garam tersebut dikonsumsi? Makanya ada standar garam. Mereka kan mengabaikan kesehatan masyarakat. Labelnya yg ada itu dari dinas perikanan. Pada saat saya disitu harus ada aturan dari BPOM. Saran dari kapolres itu harus ada BPOM, kalo tidak ada BPOM kita tangkap. Bolehlah dijual kepada perusahaan yang ada BPOM nya, seperti di pasuruan, banyuwangi. Tapi kan mereka punya perusahaan sendiri. Itu menjadi kendala, akhirnya kita rugi. Ayo kita tuntun untuk menjadi satu menjadi perusahaan biar bisa mendapat legalitas BPOM. (DP1-RM1-A2)

3. Apa target dan sasaran yang menjadi fokus dari pemerintah dalam pengembangan UMKM?

karna kita kan kawasan pesisir. Ini kawasan yang potensial sekali, tapi kita apakah didukung. Yang ada sekarang kan di kikis, berubah lahan. Abrasi, disewakan, entah itu dijual. Karena sekmen pasarnya para petani garam itu tidak ada. sudah menjual kesana tidak boleh, kesana mahal, akhirnya kan rugi. Untuk menutupi kerugian akhirnya dijual. Untuk potensinya kita luar biasa, buktinya kita surplus, ditanyakan pada saat itu kita surplus, vuma tidak bisa menjual kemana mana. Malah menurut kesehatan garam probolinggo itu termasuk cukup baik. Ada kadar sekitar 60% lah, valid nya di perikanan. (DP1-RM1-A3)

4. Bagaimana cara pemerintah untuk mengembangkan UMKM?

Pemerintah dengan rutin memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang terdaftar dalam pengusaha UMKM untuk terus meningkatkan usaha yang sedang dijalankan. Kemudian mendata bagaimana pemodalan, lalu kendala apa saja yang dialami, setelah semua keluhan kita tangani maka kita pun meminta balasan setimpal dengan meminta mereka untuk memaksimalkan pendapatan yang dihasilkan dari usahanya. (DP1-RM1-A4)

5. Seperti apa kendala Pemerintah dalam mengembangkan UMKM?

Sebenarnya untuk kendala kita punya pada SDM nya mas, karena tidak semua orang bisa kita ajak untuk b berpikir terbuka dalam hal ini saya berbicara lega; itas usahanya agar kenapa maksud saya agar usaha mereka bisa dikembangkan hingga keluar probolinggo. Saya rasa kendala kita saat ini terletak disitu sih mas. (DP1-RM1-A5)

6. Apa yang membuat UMKM petani garam layak untuk di kembangkan?

Karena garam yang dihasilkan di kabupaten probolonggo ini memiliki kandungan yang bagus sehingga kami berani bersaing dengan daerah penghasil garam lainnya. (DP1-RM2-A6)

7. Bagaimana UMKM di sektor garam dapat menjadi potensi PMBLB?

Kemarin sampai langka kan, karena mereka itu tidak bisa menjual mas. Merubah fungsi dari garam grosok menjadi konsumsi manusia, itu kan harus steril. Nah steril itu kan harus ada ijin dari BPOM terus ada suran ijin edar, itu inclout dari dinas kesehatan. Kalo sudah baik di konsumsi oleh manusia baru boleh beredar. Kemaren sempat di stop karena tidak baik di konsumsi oleh manusia.

Selama disini teman teman tidak pernah mengeksploitasi kegiatan di tambak garam, karena itu hak dari dinas perikanan, disitu ada retribusi, entah petani itu menyewa tambak atau gimana. Itupun yang saya tahu tidak diatur oleh undang undang. Ndak tahuyang di perikanan. (DP1-RM2-A7)

8. Apa langkah pemerintah dalam membangun UMKM?

Dalam langkah untuk membangun UMKM kita sebagai fasilitator pasti berupaya secara maksimal untuk membantu UMKM yang mengajukan permintaan bantuan modal maupun lahan yang dibutuhkan. Tak luput dari itu kita juga mengawasi kinerja UMKM tersebut apakah ada dampak bagi daerah sekitar maupun pendapatan asli daerah khususnya, toh kita nggak membantu semua UMKM. Kita juga harus mempertimbangkan UMKM apa saja yang lebih membutuhkan bantuan pemerintah. (DP1-RM2-A8)

9. Bagaimana kontribusi UMKM dalam meningkatkan PAD?

Jelas sangat berpengaruh. Kalo spesifik di garam Cuma orang-orang tertentu. Tapi kita tidak bisa memilah satu per satu UMKM yg berasal dari garam. Yang jelas dari komunitas garam itu tidak hanya garam saja yang saya tahu, ya ada industri seperti KUBE yang dari hasil laut dan sekitar itu. Untuk mengembangkan usaha alternatif disitu dan menopang usaha garamnya. Ada juga koperasi di situ, yang saya tahu di daerah pajurangan koperasi yang khusus garam itu. Pak buhar, ketua paguyuban di sana. (DP1-RM2-A9)

10. Fasilitas apa saja yang diberikan pemerintah kepada UMKM?

Kalau fasilitas yang kita berikan itu berupa pengajuan UMKM yang bersangkutan mas, misal kalau UMKM garam butuh diesel untuk menyalurkan air laut ke tambak ya kiranya kita mampu akan kita fasilitasi sebaik mungkin untuk menghasilkan garam yang berkualitas. (DP1-RM2-A10)

11. Bagaimana cara pemerintah dalam menggali potensi daerah?

Kalua SDA itu kan sudah diberikan dari yang maha kuasa. Kita kan sekarang harus dituntut berinovasi, entah itu dari brandingnya, entah dari segi pengolahannya. Dari apa saja yang bisa kita untuk mengeksplorasi kegiatan minerba yang ada di kab prob. Karena itu memang arahan dari atasan. Dari kegiatan seperti itu timbul adanya retribusi dan pajak, jelas ekonomi disitu jalan. Dari itu kita bisa ambil dari pajak dan retribusi. Misal ada UMKM yang promosi, ada pajak reklamenya. Tinggal mereka sendiri yang memaksimalkan, kita Cuma memfasilitasi. Kebetulan kalo itu fokusnya itu ada di dinas koperasi. Kalau masalah peralatan untuk meningkatkan daya saing itu ada di disperindag. Karena kita sudah bagi tugas mas. (DP1-RM3-A11)

12. Seperti apa peningkatan potensi daerah yang terjadi di wilayah kabupaten Probolinggo?

Peningkatan potensi di kabupaten probolinggo ini bisa dibilang cukup baik mas, Karena banyak potensi dari sektor penerimaan pajak yang mulai di kelola oleh pemerintah, contohnya yang paling banyak itu di sektor pariwisatanya mas soalnya pada tahun kemaren itu fokus kabupaten ini ke sektor pariwisata. (DP1-RM3-A12)

13. Seperti apa ketimpangan ekonomi di kabupaten probolinggo?

Pertama jelas dari kesadaran masyarakat mas, atas apa yang dia lakukan akan timbul efek seperti pajak dan retribusi. Kesadaran mereka itu kurang. Terjadi pada PBB. Mereka tidak akan bayar kalau tidak di tagih, dan mereka itu karepe dewe, nah itu dari segi SDM.

Kalua temene temen itu Cuma banyak menunggu, menunggu dari hasil orang lain itu beraktifitas. Intinya tidak melihat, bahkan ada investor luar yang masuk, setelah ada investor luar yang masuk mereka kebingungan. Karna itu, efek dari situ kan masyarakat hidup, ekonomi masyarakat sedikit berkembang. SDM tidak kuat mas, negara untuk membiayai seperti itu ndak sanggup. Merka harus berkreasi sendiri, kami hanya memfalisitasi. Itupun sebisa yang kami mampu, tidak semuanya kita bantu. Tergantung skala prioritas, apakah ini menjadi prioritas apa tidak.

Makanya sekarang kita selaku fasilitator menyiapkan bagaimana ekonomi disuatu tepat bisa hidup dalam rana hukum. Bukan semaunya sendiri, kadang mereka maunya sendiri, tidak sesuai SOP yang ada. Air lautnya punya provinsi, pantainya punya kia, akhirnya kita bekerja keras untuk mengeluarkan ijin untuk aktifitas yang ada itu. Istilahnya biarkan mereka bekerja tapi tidak mengenyampingkan hak dan kewajibannya membayar pajak. Ada pajak hiburan, parker dll. Seperti minerba itu kita mau masuk, tapi kita ndak bisa, karna hak dari propinsi. Ada bagi hasil dari propinsi dan daerah. Memang betul propinsi dan pusat itu mengambil wewenang dari kegiatan kegiatan tersebut. Takutnya lambat laun kabupaten dan kota itu maunya sendiri. Seperti air bawah tanah dulunya di kelolah dari kabupaten. Karena ini hasil bumi maka diambil oleh propinsi, kenapa? Biar kordinasi antar kota kabupaten itu enak, buktinya ranu di lumajang itu kan besar sumbernya. Itu kan harusnya mengalir sekelilingnya, termasuk probolinggo. Itu di stop mas, karena tidak adanya MOU. Akhirnya kita membuat perjanjian. Nah dari kejadian tersebut maka diambil jalur tengahnya maka diambil propinsi saja, biar kordinasinya enak.

Akhirnya ada tolak usul apa saja yg bisa diambil propinsi dana pa saja yang diambil daerah. Seperti itu. (DP1-RM3-A13)

Lampiran 2

Nama : Ir. Susilo Isnadi, MM.

Jabatan : Kepala bidang pendapatan

Tanggal : 5 Februari 2018

Jam : 15.00 WIB

Tempat : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Probolinggo

1. Apa fokus Kab. Probolinggo dalam Pembangunan Daerah?

berbicara tentang kabupaten probolinggo berarti lingkup kecil ya mas, untuk fokusnya sendiri ada di visi misi bupati terpilih yaitu optimalisasi pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. pada tahun 2018 ini di khususkan di sektor pariwisata dulu mas. Untuk tahun 2017 pada sektor pendidikan. (DP2-RM1-A1)

2. Adakah fokus Daerah dalam pengembangan UMKM di sektor garam?

Ada mas, itu masuk dalam optimalisasi sumber daya yang dimiliki oleh kabupaten probolinggo. Kemudian adanya bantuan dan sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki unit usaha di sektor garam maupun sektor lain. Di sisi lain kalau untuk petani garam umkm garam itu kita juga membantu dalam bentuk memfasilitasi seperti alat yang diberikan dari dinas perikanan berupa bilma, tero, dll (DP2-RM1-A2)

3. Bagaimana cara pemerintah untuk mengembangkan UMKM?

Pemerintah daerah kabupaten probolinggo berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan dukungan bagi pengembangan UMKM, berupa sosialisasi langsung dan bantuan bagi UMKM yang mengajukan permohonan kepada kami agar mendapat modal untuk memajukan usaha yang telah di bangun oleh masyarakat sekitar, contohnya seperti UMKM garam mas yang mas teliti. (DP2-RM1-A3)

4. Seperti apa kendala Pemerintah dalam mengembangkan UMKM?

Mungkin ada beberapa kendala yang kami hadapi seperti tidak patuhnya pemilik UMKM atau lahan yang di jadikan tempat pembuatan garam tidak membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, terus masyarakat yang kurang memahami

tentang pengarahan dari kami dalam sosialisai tentang pengembangan UMKM tersebut. (DP2-RM1-A4)

5. Apa yang membuat UMKM petani garam layak untuk di kembangkan?

Karena daerah kabupaten probolinggo ini merupakan daerah pesisir dimana kita dapat memaksimalkan sumber daya alam yang telah dilimpahkan di daerah kita. Setau saya UMKM garam itu juga cukup luas cakupan pendistribusiannya, tidak hanya di sekitar probolinggo saja bahkan jember, lumajang, pasuruan juga mengambil di kabupaten probolinggo. Jadi tidak ada salahnya pemerintah memberikan dukungan penuh pada petani garam untuk mengembangkan usahanya, bahkan bisa dibuatkan legalitas untuk pendistribusian di daerah probolinggo sendiri. (DP2-RM2-A5)

6. Bagaimana kontribusi UMKM dalam meningkatkan PAD?

UMKM sendiri selain berperan dalam penghasilan daerah di dalam sektor pajak juga berperan dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. UMKM juga sangat berperan dalam mengatasi pengangguran. (DP2-RM2-A6)

7. Fasilitas apa saja yang diberikan pemerintah kepada UMKM?

Pemerintah memberikan fasilitas yang sekiranya menjadi permasalahan semua orang, yaitu pemodal. Adanya program pemerintah berupa kredit usaha rakyat (KUR) jadi UMKM bisa memanfaatkan kur tersebut untuk menambah modal usaha. (DP2-RM2-A7)

8. Apa cara yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan PAD dari segi potensi daerah?

Kita melakukan penyuluhan terhadap wilayah-wilayah dimana ada suatu potensi yang berdampak pada perkembangan daerah dalam segi ekonomi. Kita mendukung UMKM yang memiliki legalitas perijinan usaha secara maksimal sehingga kami mengharapkan pengusaha UMKM pun memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada sehingga bisa membantu meningkatkan PAD. (DP2-RM2-A8)

9. Bagaimana cara pemerintah dalam menggali potensi daerah?

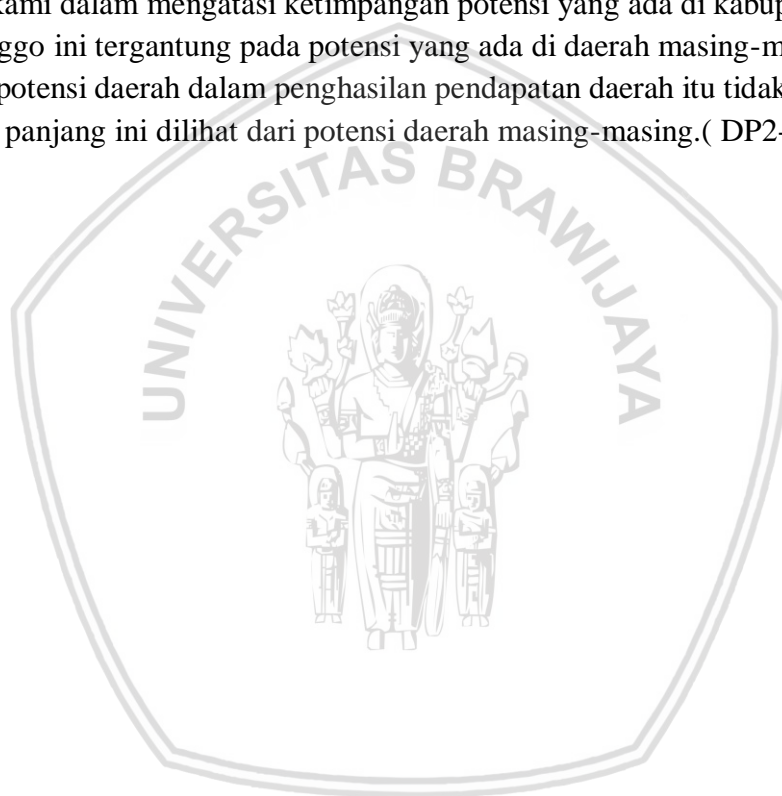
kita membantu dengan cara memberikan kemudahan usaha kepada masyarakat yang ingin membangun unit usaha kerja, menyediakan fasilitas seperti kemudahan legalitas, perluasan jaringan pendistribusian ya seperti itu lah pokonya mas saya pusing mas beneran. (DP2-RM2-A9)

10. Seperti apa peningkatan potensi daerah yang terjadi di wilayah kabupaten Probolinggo?

Peningkatan potensi daerah di kabupaten provinsi probolinggo itu cukup banyak bukan hanya di bidang UMKM saja, tahun 2017 kemarin potensi di kabupaten probolinggo itu di fokuskan di sektor pariwisata sudah ada sekitar 4 objek wisata di kabupaten probolinggo yang dibuka untuk umum dan bisa dinikmati dengan cara membayar retribusi ke tempat wisata tersebut untuk meningkatkan anu apa penghasilan masyarakat sekitar yang berperan penting untuk mengelolah wisata tersebut, juga adanya pengawasan pemerintah. (DP2-RM3-A10)

11. Bagaimana ketimpangan yang terjadi di setiap wilayah terkait potensi daerah?

Upaya kami dalam mengatasi ketimpangan potensi yang ada di kabupaten probolinggo ini tergantung pada potensi yang ada di daerah masing-masing gitu loh, toh potensi daerah dalam penghasilan pendapatan daerah itu tidak sama kalau dijelasin panjang ini dilihat dari potensi daerah masing-masing. (DP2-RM3-A11)



Lampiran 3

Surat izin riset dari Fakultas Ilmu Administrasi

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI****UNIVERSITAS BRAWIJAYA****FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

<http://fia.ub.ac.id>E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 17552/UN10.F03.12.12/pv/2017

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Bupati Probolinggo
c/q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL)
Kabupaten Probolinggo
di -
Probolinggo

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan
Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Muhammad Firdaus

Alamat : Jl. Tirta Mulyo No.63A

NIM : 135030407111051

Jurusan : Administrasi Bisnis

Prodi : Perpajakan

Tema : Analisis Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Sektor UMKM Garam
Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah

Lamanya : 2 (dua) minggu.

Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 14 November 2017

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Perpajakan

**Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si**

NIP. 19600515 198601 1 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU

Lampiran 4

Surat Keterangan Untuk Melakukan Survey/Riset dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Ahmad Yani 23 – Telpn (0335) 421440-434455
PROBOLINGGO

SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY/RESEARCH

Nomor : 072/ 619/426.204/2017

Membaca : Surat dari : **FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG**
 Tertanggal , 14 Nopember 2017 Nomor : 17552/UN10.F03.12.12/PN/2017 Perihal :
 Permohonan Ijin Riset/Survey.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 18 Tahun 2002 Tentang sistim Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 25 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Probolinggo.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** dilakukan Survey/Research oleh :

Nama Peneliti / Penanggung Jawab : **MUHAMMAD FIRDAUS**
 NIDN/NIP. : 13503040711051
 Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa
 Alamat : Jln. Diponegoro Gg Cemara Indah RT 01/RW 05 Kel. Sidomukti
 Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.
 Thema/Acara Survey/Resarch : Analisis Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Sektor UMKM Garam sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah.
 Daerah / tempat dilakukan Survey / Research : Badan Keuangan Daerah Kab. Probolinggo.
 Lamanya Survey / Research : 05 Desember s/d 05 Pebruari 2018 ijin berlaku 3 (tiga) bulan sejak suratdikeluarkan.
 Pengikut peserta Survey / Research : -

Dengan **ketentuan sebagai berikut**

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan, melaporkan kedatangannya kepada Pejabat setempat.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan, serta menghindari pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan maupun / menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan survey / research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research sebelum meninggalkan daerah survey / research.
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan survey / research diwajibkan memberikan laporannya secara tertulis tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada Bupati Probolinggo Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Probolinggo, 4 Desember 2017

KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PROBOLINGGO



AGUS MUKSON. SH. MSI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700817 199003 1 007

TEMBUSAN :

1. Ibu Bupati Probolinggo (sebagai laporan)
2. Sdr. Komandan Kodim 0820 Prob;
3. Sdr. Kapolres Probolinggo;
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Probolinggo;
5. Sdr. Ketua Program Studi Perpajakan UNIV. Brawijaya Malang;
6. Yang bersangkutan



Lampiran 5

Surat Perintah Disposisi Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo untuk melakukan survey di tempat yang telah disetujui

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN KEUANGAN DAERAH

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari	: Bales bang pel	Diterima tanggal	: 21 - 12 - 17
Tanggal Surat	: 04 - 12 - 2017	Nomor Agenda	: 2667
Nomor Surat	: 073 / 1610	Diteruskan kepada	:
Perihal	: sur. kelangan dlm Melakukan SURVEY.	1. KA : PSKD	
		2.	
		3.	

ISI DISPOSISI

Yth Sekretaris

R. F. S. S. S.

R. 22
R. 17

Yth. Kasim

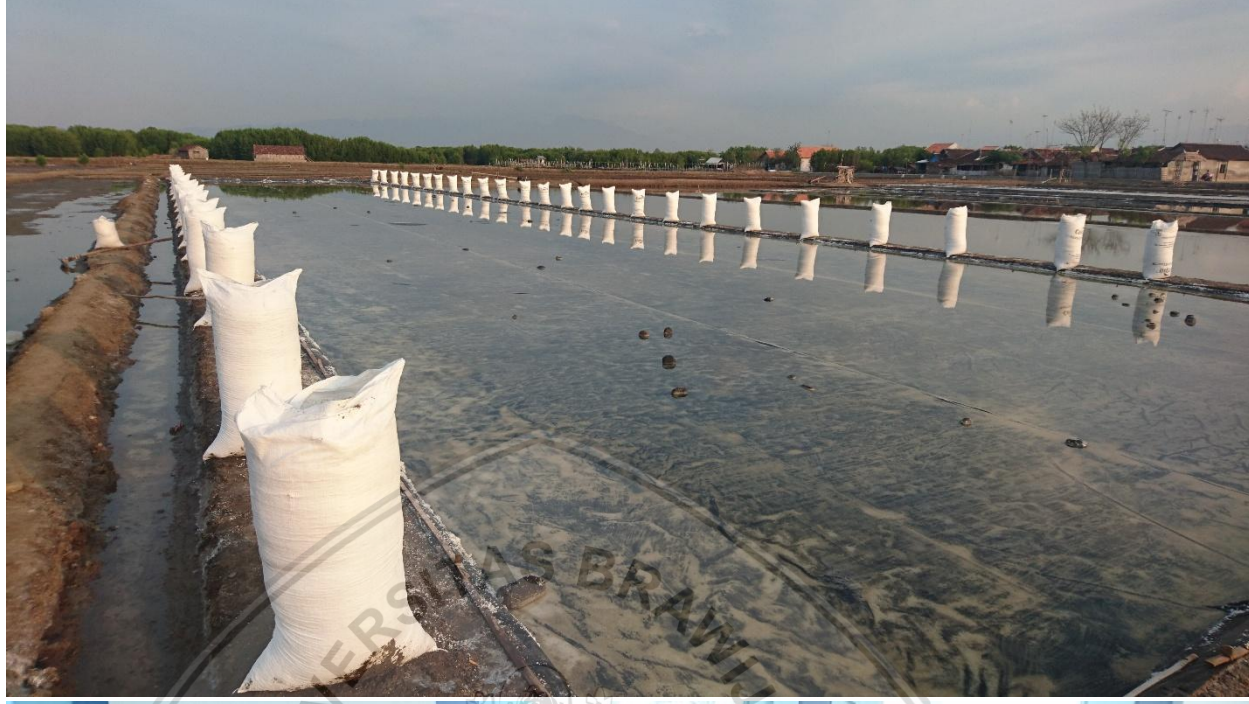
R. 12

22
12 17

Lampiran 6

Dokumentasi







CURICULLUM VITAE

Nama : Muhammad Firdaus
NIM : 135030407111051
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 27 September 1994
Provinsi : Jawa Timur
Kota : Kabupaten Probolinggo
Alamat : Jl. Dipenogoro Gg. Cemara Indah RT.01 RW.05
Sidomukti, Kec. Kraksaan.
Pendidikan : 1. SD Patokan I Tamat tahun 2006
2. SMP Negeri 1 Kraksaan Tamat tahun 2009
3. SMA Negeri 1 Kraksaan Tamat tahun 2012

